

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 297 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SOLOKANJERUK
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan Solokanjeruk untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kecamatan Solokanjeruk untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP
RENSTRA KECAMATAN SOLOKANJERUK

Pasal 2

Dokumen Renstra Kecamatan Solokanjeruk merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Solokanjeruk untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Solokanjeruk yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Kecamatan Solokanjeruk yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra Kecamatan Solokanjeruk bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Solokanjeruk dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Kecamatan Solokanjeruk dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Kecamatan Solokanjeruk agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Solokanjeruk;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Solokanjeruk;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Kecamatan Solokanjeruk.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN
SOLOKANJERUK

Pasal 4

(1) Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Kecamatan Solokanjeruk dalam menyusun Renja Kecamatan Solokanjeruk.

(2) Renstra Kecamatan Solokanjeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Kecamatan Solokanjeruk paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Kecamatan Solokanjeruk; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Kecamatan Solokanjeruk.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029;
   2. strategi Kecamatan Solokanjeruk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Kecamatan Solokanjeruk dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Kecamatan Solokanjeruk; dan
4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Kecamatan Solokanjeruk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KECAMATAN SOLOKANJERUK

Pasal 5

(1) Kecamatan Solokanjeruk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Solokanjeruk dan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Solokanjeruk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Kecamatan Solokanjeruk terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Solokanjeruk.

(3) Camat Solokanjeruk menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Kecamatan Solokanjeruk.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN SOLOKANJERUK

Pasal 6

Perubahan Renstra Kecamatan Solokanjeruk dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Solokanjeruk mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Kecamatan Solokanjeruk dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Kecamatan Solokanjeruk, maka Renstra Kecamatan Solokanjeruk dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Kecamatan Solokanjeruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan Solokanjeruk terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Kecamatan Solokanjeruk.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 297

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 297 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SOLOKANJERUK KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan antara lain bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, serta program Kepala Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMN dan RPJPD, maka Pemerintah Kecamatan Solokanjeruk perlu melakukan penyusunan Rencana Strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penyusunan tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2025 - 2029 berfungsi sebagai pedoman penyusunan Renja perangkat daerah yang disusun untuk mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPD serta target sasaran pembangunan nasional dan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun tahun 2025 - 2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah kewilayahan Kecamatan tidak terlepas dan memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) khususnya pemerintah daerah kota ataupun kabupaten, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kecamatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah khususnya yang berada di kewilayahan. Kecamatan adalah bagian dari organisasi pemerintah daerah yang berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat daerah khususnya di kewilayahan sesuai dengan kewenangannya.

Penyusunan Renstra Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025 – 2029. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan Renstra OPD.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui:

1. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: pembentukan tim penyusunan Renstra, orentasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta penyiapan data dan informasi perencanaan berdasarkan SIPD;
2. Tahapan penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan RPJMD, mencakup antara lain: pendahuluan, gambaran pelayanan

Perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program kegiatan dan subkegiatan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan serta penutup;

3. Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Bandung tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah beserta lampirannya yaitu Rancangan RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah; perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah; perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama tahun 2025 - 2029, termasuk lokasi kegiatan; perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD;
4. Tahapan perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
5. Tahapan penetapan Renstra PD yang telah ditetapkan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Solokanjeruk selaku kepala Perangkat Daerah, serta dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Bapperida Kabupaten Bandung.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 90).

1.3 Maksud dan Tujuan

Uraian dari maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah bagi Kecamatan Solokanjeruk dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik selama periode lima tahun. Renstra ini menjadi dasar dalam penyusunan Renja tahunan serta instrumen pengukuran kinerja kecamatan yang terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah:

a. Mewujudkan perencanaan pembangunan wilayah kecamatan yang terarah, terpadu, terukur, dan berkesinambungan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah;
b. Menyediakan acuan bagi penyusunan Renja Kecamatan setiap tahun dalam periode 2025–2029 agar tetap selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD);
c. Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah ke dalam program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Kecamatan Solokanjeruk;
d. Menjadi dasar evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan, guna menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tugas dan fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan dan permasalahan serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tujuan Renstra, sasaran Renstra, strategi serta arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM,KEGIATAN,SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, pagu indikatif dan uraian subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah serta target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SOLOKANJERUK

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk

Pelayanan di tingkat kecamatan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, administrasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Di kecamatan, masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan administratif seperti pembuatan surat keterangan, pengesahan dokumen, pengurusan rekomendasi izin usaha kecil, hingga rekomendasi untuk berbagai keperluan. Pelayanan ini biasanya diberikan melalui loket-loket yang terorganisasi, dengan standar prosedur pelayanan publik yang ditetapkan untuk memastikan transparansi, kecepatan, dan akuntabilitas.

Kecamatan juga menjadi pusat koordinasi antara pemerintah daerah dengan desa di wilayahnya. Dalam perannya, kecamatan memfasilitasi pembinaan pemerintahan desa, membantu penyaluran bantuan sosial, serta mendukung pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Camat sebagai pimpinan kecamatan bertugas mengkoordinasikan seluruh layanan ini, termasuk menyelenggarakan musyawarah masyarakat, memediasi konflik lokal, serta memastikan aspirasi warga sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Dalam perkembangannya, pelayanan di kecamatan kini semakin diarahkan untuk berbasis teknologi informasi. Kecamatan Solokanjeruk telah mengadopsi sistem pelayanan berbasis digital, seperti pelayanan surat menyurat secara online, sistem antrean elektronik pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga dan E-KTP, hingga aplikasi *mobile* lainnya untuk memudahkan akses masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan administrasi mereka.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Solokanjeruk

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, serta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

Dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya,

Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum,pembangunan dan sosial budaya.
b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya.
c. Penyelengaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja kecamatan.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Camat membawahkan:

1. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan
c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;

d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten);
f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahkan Subbagian Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian.

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
f. Pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan;
h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok Menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan subbagian dan seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja subbagian umum dan kepegawaian;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kepala Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

5. Kepala Seksi Pembangunan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.

6. Kepala Seksi Sosial Budaya

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi

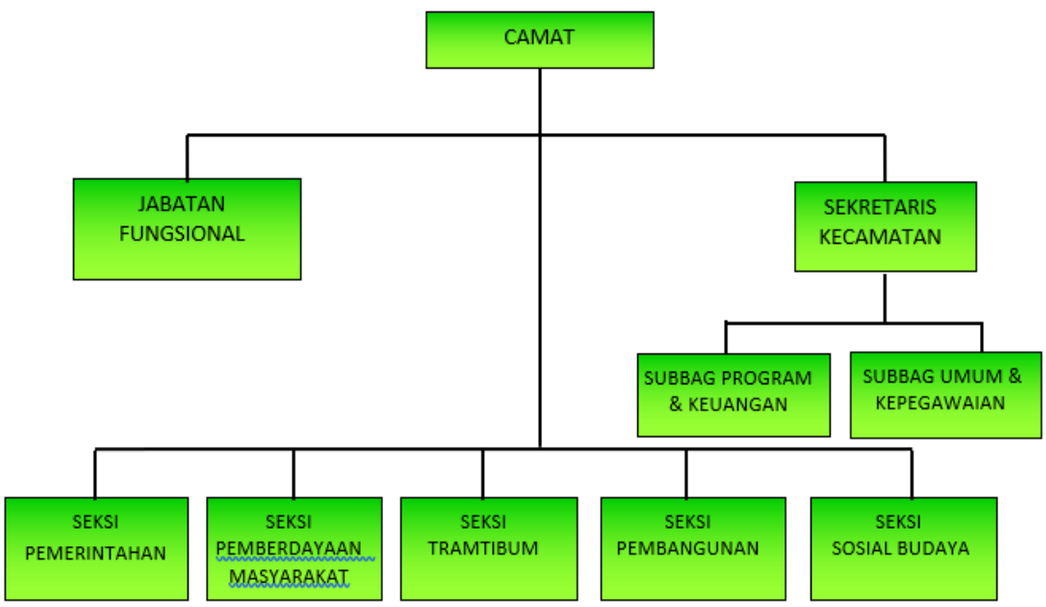
Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.

7. Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian kegiatan kecamatan secara professional berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan dengan kebutuhan.

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Solokanjeruk



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Solokanjeruk

Sumber daya yang ada di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung terdiri dari penyediaan sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal, dan penyediaan sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja kursi, peralatan kantor dan lain-lain.

A. Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Solokanjeruk

Pegawai Negeri Sipil pada Kecamatan Solokanjeruk berjumlah 21 orang, terdiri dari 9 Pejabat struktural, 13 staf /JFU. Selain itu terdapat pula 7 orang sukwan dan 7 orang Banpol dan 7 orang Linmas. Adapun susunan Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kecamatan Solokanjeruk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pegawai Kecamatan Solokanjeruk
berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah	
	L	P		
1. Golongan IV/a	3	1	4	Orang
2. Golongan III/d	1	1	2	Orang
3. Golongan III/c	1	1	2	Orang
4. Golongan III/b	-	1	1	Orang
5. Golongan III/a	3	1	4	Orang
6. Golongan II/d	3	2	5	Orang
7. Golongan II/c	2	-	2	Orang
8. Kels VII (PPPK)	2	-	2	Orang
Jumlah	15	7	22	Orang

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Tabel 2.1 menunjukan, pegawai Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung berdasarkan pangkat/ golongan terdiri atas IV/a 4 orang, III/d 2 orang, III/c 2 orang, III/b 1 orang, III/a 4 orang, II/d 5 orang, II/c 2 orang, PPPK 2 orang. Bila dilihat berdasarkan pangkat/ golongan pegawai Kecamatan Solokanjeruk cukup memadai.

Tabel 2.2 Pegawai Kecamatan Solokanjeruk
berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Nama	Jenis Kelamin		Jumlah		Keterangan
1	Sarjana/S2	4	2	6	orang	
2	Sarjana/S-1	1	3	4	orang	
3	Diploma III/IV	3	1	4	orang	
4	SMA/SLTA	7	1	8	orang	
	Jumlah	15	7	22	orang	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Tabel 2.2 menunjukan, pegawai Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung berdasarkan tingkat pendidikan terdiri atas SMA/SLTA 8 orang, Diploma III/IV 4 orang, S1 4 orang dan S2 6 orang. Bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Solokanjeruk cukup memadai dalam proses membangun wilayah.

Tabel 2.3 Pegawai Negeri Sipil Pada
Kantor Kecamatan Solokanjeruk Berdasarkan Diklat
Struktural/Kepemimpianan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Diklatpim II	-	-	0
2	Diklatpim III	2	-	2
3	Diklatpim IV	3	2	5
JUMLAH		5	2	7

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Tabel 2.4 Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor
Kecamatan Solokanjeruk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	15
2	Perempuan	7
JUMLAH		22

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

B. Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Solokanjeruk dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah bangunan kantor dengan luas 2.700 m^2,

kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit, roda 2 sebanyak 7 roda 3 sebanyak 2 unit, saluran telepon sebanyak 1 line, fasilitas komputer Fc dan laptop 21 unit yang didukung oleh jaringan internet, Kecamatan Solokanjeruk memiliki gedung aula kapasitas 150 orang dan 1 ruang rapat biasa dan sarana lainnya seperti mushola dan kamar mandi dan sarana lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik atau rusak.

Aset Daerah merupakan kekayaan milik Daerah dan berfungsi pula sebagai penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Solokanjeruk.

Tabel 2.5 Aset Daerah yang Dikelola Kecamatan Solokanjeruk

NO	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Tanah	1 Bidang	Baik dan tidak berkurang	Digunakan gedung kantor, mushola, dan aula
2	Bangunan	1 Komplek	Baik/sedang	Gedung kantor, aula, rumah dinas, mushola
3	Pompa tangan	3 Unit	Baik	Mutasi dari Distan
4	Pompa air	1 Unit	Baik	
5	Kendaraan roda 4	2 Unit	Baik	
6	Kendaraan roda 2	5 Unit	Baik/sedang/ rusak ringan /rusak berat	Perlu perbaikan /penghapusan
7	Kendaraan roda 3	1 Unit	Rusak	Perlu perbaikan
8	Gerobak tarik	1 Unit	Rusak sedang/rusak berat	Perlu Penghapusan
9	Gerobak dorong	1 Unit	Rusak sedang	Perlu perbaikan
10	Alat prosesing	1 Unit	Rusak	Perlu perbaikan
11	Mesin tik listrik	3 Unit	Baik	
12	Mesin absen	1 Unit	Baik	
13	Lemari kayu	12 Unit	Baik/sedang/rusak	Perlu perbaikan /penghapusan
14	Rak kayu	2 Unit	Sedang	

NO	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
15	Rak besi	4 Unit	Baik	
16	Filling cabinet besi	19 Unit	Baik/sedang/rusak	Perlu perbaikan/penghapusan
17	Lemari kaca	1 Unit	Baik	
18	Lemari makan	2 Unit	Baik	
19	CCTV	1 Unit	Baik	
20	White board	2 Unit	Baik	
21	Alat penghancur kertas	1 Unit	Rusak	Perlu perbaikan
22	LCD projector / infocus	1 Unit	Baik	
.23	Papan instansi	2 Unit	Sedang	
24	Papan tulis kantor	2 Unit	Sedang	
25	Alat kantor lainnya	4 Unit	Baik/sedang	
26	Meja kerja kayu	9 Unit	Baik/sedang/ rusak	Perlu perbaikan
27	Kursi besi /metal	11 unit	Baik/sedang/rusak	
28	Meja rapat	5 Unit	Baik/sedang	
29	Tempat tidur kayu	1 unit	Baik	
30	Kasur/spring bad	2 unit	Baik	
31	Meja makan besi	1 unit	Baik	
32	Kursi rapat	92 unit	Baik/sedang/rusak	Perlu penghapusan Sebagian
33	Kursi tamu	2 Unit	Sedang	
34	Kursi putar	29 Unit	Baik/sedang/rusak	Perlu penghapusan Sebagian
35	Kursi lipat	30 unit	Baik/sedang/rusak	Perlu penghapusan Sebagian
36	Meja komputer	1 unit	Sedang/rusak	Perlu perbaikan

NO	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
37	Sofa	3 Unit	Sedang	
38	Mebeleur lainnya	1 unit	Sedang	
39	Mesin pemotong rumput	1 unit	Sedang	
40	Lemari es	1 unit	Baik	
41	A C. window	2 unit	Sedang	
42	A C. split	2 unit	Baik/sedang	
43	Kipas angin	3 unit	Sedang	
44	Kompor gas	3 Unit	Sedang/rusak	Perlu penghapusan
45	Rice cooker	4 unit	Sedang/rusak	Perlu penghapusan
46	Televisi	3 unit	Baik/Sedang	
47	Sound system	3 unit	Baik/sedang	
48	Camera vidio	1 unit	Rusak	Perlu penghapusan
49	Dispenser	10 unit	Baik/sedang/rusak	Perlu penghapusan
50	Vertical blind	1 unit	Baik	
51	Gordyn/kray	1 Unit	Sedang	
52	Meja tamu biasa	2 unit	Sedang	
53	Lemari buku arsip	2 unit	Baik	
54	Foto tustel	1 unit	Rusak	Perlu penghapusan
55	Layar film /projector	3 unit	Sedang	
56	Telepon mobile	2 unit	Baik	
57	Handy talky	9 unit	Baik/sedang/rusak	Perlu perbaikan
58	Facsimile	1 unit	Baik	
59	Genset	1 unit	Baik	
60	Alat kedokteran lain	2 unit	Sedang	
61	Stabillizer	2 unit	Sedang	

NO	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
62	PC based UV gel	1 unit	Sedang	
63	P.C unit	16 unit	Baik/sedang/ rusak/rusak berat	Perlu perbaikan/penghapusan
64	Laptop	10 unit	Baik/sedang/ rusak/rusak berat	Perlu perbaikan/penghapusan
65	Note book	1 unit	Rusak	Perlu Perbaikan
66	Printer	19 unit	Baik/sedang/ rusak/rusak berat	Perlu perbaikan/penghapusan
67	Scaner	2 Unit	Baik	
68	External/portable hardisk	1 Unit	Baik	
69	Peralatan personal komputer lainnya	1 unit	Sedang	
70	Modem	1 unit	Baik	
71	Wirelles access point	1 unit	Baik	
72	Peralatan jaringan lainnya	1 unit	Baik	
73	Tenda	2 unit	Rusak berat	Perlu penghapusan
74	Alat tenis meja	3 unit	Baik/sedang/rusak berat	Perlu penghapusan
75	Buku umum lain-lain	Baik		

Sumber : Bagian Aset Solokanjeruk Bulan Desember 2024

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Solokanjeruk dapat dilihat atau dicermati dalam Renstra periode sebelumnya (periode tahun 2021–2026) dimana Kecamatan

Solokanjeruk telah melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator dan target yang harus dicapai.

2.1.3.1 Data-Data dan Informasi Terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Solokanjeruk

Dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung bahwa Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung yang dipimpin oleh Camat diangkat dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 90), dalam pasal 2 Camat adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat;
2. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan;
3. Camat menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai fungsi ;
    a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
    b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
    c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

4. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Camat mempunyai subtugas sebagai berikut:
   a. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya;
   b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
   c. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan;
   d. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa

Pelaksanaan tugas pokok Camat sebagai Perangkat Daerah adalah membantu Bupati dalam bidang Pemerintahan Daerah yang kegiatannya mengacu pada Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan Kepada Camat sebagaimana dimaksud meliputi urusan pemerintahan:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Urusan Sosial
5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Urusan Pertanahan
7. Urusan Lingkungan Hidup
8. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Urusan Komunikasi Dan Informatika
11. Urusan Koperasi, Usaha Keci, dan Menengah
12. Urusan Penanaman Modal
13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
14. Urusan Kebudayaan
15. Urusan Pariwisata
16. Urusan Pertanian

A. Kewenangan di Kecamatan Solokanjeruk

1. Pelayanan Publik

Kecamatan Solokanjeruk, memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Kewenangan ini merupakan bagian dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah kabupaten, yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efisien, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan Solokanjeruk mencakup layanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan surat pengantar untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya serta surat-surat Keterangan lainnya. Selain itu, kecamatan juga memberikan pelayanan legalisasi dokumen, surat keterangan domisili, dan berbagai perizinan yang telah dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah kabupaten.

Kecamatan Solokanjeruk juga memiliki peran strategis dalam koordinasi pembangunan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah di tingkat desa dan kelurahan. Dalam pelayanannya, kecamatan dituntut untuk mampu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat serta menerapkan prinsip-prinsip pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan warga. Sebagai pusat pelayanan publik tingkat kecamatan, Solokanjeruk terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi sistem administrasi, peningkatan

kapasitas aparatur, serta kolaborasi dengan instansi lain. Tujuan utamanya adalah menciptakan pelayanan publik yang prima dan merata bagi seluruh masyarakat di wilayah kecamatan, sehingga mendukung tercapainya pemerintahan yang baik dan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Bandung.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kecamatan Solokanjeruk menjalankan kewenangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa. Melalui koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa, kecamatan berperan sebagai fasilitator untuk mendorong desa-desa agar mampu menggali potensi lokal, mengelola sumber daya secara mandiri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan penguatan kelembagaan desa menjadi bagian dari upaya pemberdayaan yang dijalankan oleh kecamatan.

Selain itu, Kecamatan Solokanjeruk juga bertugas mengawasi pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa agar tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Kecamatan menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa dalam penyampaian informasi, kebijakan, serta sinkronisasi program. Dengan menjalankan kewenangan ini, kecamatan berperan penting dalam mendorong kemandirian desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di wilayah Solokanjeruk secara berkelanjutan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum menjadikan kecamatan sebagai perpanjangan tangan bupati. Kecamatan bertugas menjaga stabilitas wilayah, memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, mengoordinasikan penanggulangan bencana, hingga memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga atau antar desa. Fungsi ini penting untuk memastikan pemerintahan berjalan tertib dan harmonis.

4. Penunjang Pemerintahan Daerah

Kecamatan Solokanjeruk berperan sebagai penghubung koordinasi antara perangkat daerah dengan pemerintah desa. Kecamatan juga membantu sinkronisasi program pembangunan daerah dengan aspirasi desa serta menyediakan data sektoral sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan daerah dapat terimplementasi lebih tepat sasaran.

5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dimana Kecamatan Solokanjeruk diposisikan sebagai fasilitator keamanan wilayah. Melalui koordinasi dengan kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas, kecamatan berupaya menjaga kondusifitas wilayah, mencegah konflik sosial, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi peraturan.

6. Pembinaan dan Pengawasan Desa

Kecamatan Solokanjeruk memiliki tanggung jawab membina kepala desa dan perangkatnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Kecamatan juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, memberikan arahan dalam penyusunan peraturan desa, serta membantu menyelesaikan permasalahan antara pemerintah desa dan masyarakat.

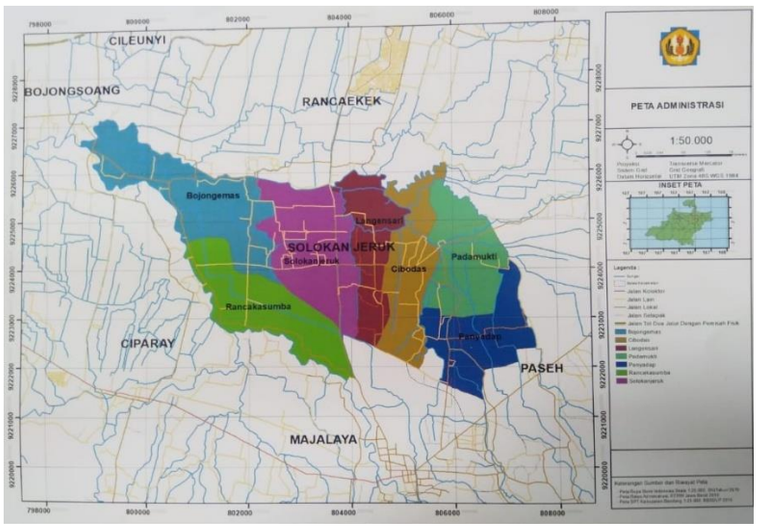
B. Data Demografi Kecamatan Solokanjeruk

Kecamatan Solokanjeruk berdiri pada tanggal 01 Agustus 2001 yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Majalaya, berikut pengisian jabatan strukturalnya dan efektif eksistensinya telah dimulai pada tanggal tersebut. Kecamatan Solokanjeruk adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dan memiliki luas wilayah 35,35 Km2.

Adapun kondisi umum pada Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada 107° 44’ 57” bujur timur dan 7° 1’ 12” lintang selatan, sedangkan berdasarkan topografinya Sebagian besar wilayah di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung merupakan hamparan atau daratan rendah dengan ketinggian di atas 657 m s/d 698 m di atas permukaan laut dengan suhu maksimum 33°C dan minimum 23°C dengan

curah hujan rata - rata 920 mm per/tahun. Kecamatan Solokanjeruk berada di kawasan timur dengan potensi industri pengolahan baik perusahaan besar maupun kecil. Luas wilayah Kecamatan Solokanjeruk dibagi menjadi beberapa kategori diantaranya luas lahan pertanian sawah, luas lahan pertanian bukan sawah dan luas lahan non pertanian. Desa terluas wilayah ada di Desa Bojongemas tercatat 4,53 Km2 dan desa yang wilayah terkecil ada di desa Panyadap 2,31 Km2. Potensi pertanian yang ada adalah tanaman pangan dan hortikultura.

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Solokanjeruk



Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Kecamatan Solokanjeruk yang dengan luas wilayah ± 2.345.458 Ha, dengan jumlah penduduk 94.128 jiwa yang terdiri dari 48.214 jiwa penduduk laki-laki dan 45.914 jiwa penduduk perempuan, dengan membawahi 7 desa, 20 dusun,113 RW dan 400 RT dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Kecamatan Rancaekek
- Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Majalaya
- Timur : berbatasan dengan Kecamatan Paseh
- Barat : berbatasan dengan Kecamatan Ciparay

Data demografi Kecamatan Solokanjeruk mencerminkan jumlah penduduk, sebaran jenis kelamin, serta komposisi usia yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan. Informasi ini tidak hanya menggambarkan kondisi terkini, tetapi juga menjadi acuan dalam memproyeksikan kebutuhan

pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program pemberdayaan masyarakat lima tahun ke depan.

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Rancakasumba	6.833	6.314	13.147
2	Solokanjeruk	9.287	8.932	18.219
3	Cibodas	6.641	6,289	12.930
4	Panyadap	7.107	6.772	13.879
5	Bojongemas	7.428	7.105	14.533
6	Padamukti	4.742	4.559	9.301
7	Langensari	6.176	5.943	12.119
Jumlah		48.214	45.914	94.128

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Sem. 1 Tahun 2025

Tabel diatas menyajikan data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Solokanjeruk yang terdiri dari tujuh desa. Dari total penduduk sebanyak 94.128 jiwa, terdapat 48.214 laki-laki dan 45.914 perempuan, menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Solokanjeruk dengan 18.219 jiwa, sedangkan desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Padamukti dengan 9.301 jiwa. Secara umum, setiap desa memiliki jumlah penduduk laki-laki yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Data ini penting sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah, seperti pengadaan layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan infrastruktur lainnya. Keseimbangan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan yang relatif stabil juga menunjukkan struktur demografis yang sehat. Selain itu, distribusi jumlah penduduk yang berbeda di tiap desa dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan dan alokasi sumber daya di Kecamatan Solokanjeruk.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga di Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025

No.	Desa	Kepala keluarga		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Rancakasumba	3.601	909	4.510
2	Solokanjeruk	4.946	1.102	6.046
3	Cibodas	3.525	848	4.373
4	Panyadap	3.863	793	4.656
5	Bojongemas	3.997	885	4.882
6	Padamukti	2.600	580	3.180
7	Langensari	3.342	801	4.143
Jumlah		25.874	5.918	31.792

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Sem. 1 Tahun 2025

Tabel di atas menyajikan data jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin di tujuh desa, setiap desa mencatat jumlah kepala keluarga laki-laki dan perempuan secara terpisah, dari data di atas menunjukkan bahwa dari total 31.792 kepala keluarga, sebanyak 25.874 kepala keluarga (81.4%) adalah laki-laki, sementara 5.918 kepala keluarga (18.6%) adalah perempuan. Ini mengindikasikan bahwa struktur keluarga di wilayah ini masih didominasi oleh peran tradisional, di mana laki-laki berperan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama. Hal ini sejalan dengan norma sosial dan budaya yang masih kuat di banyak wilayah pedesaan di Indonesia. Distribusi kepala keluarga laki-laki yang tinggi secara merata di seluruh desa menunjukkan kestabilan dalam struktur keluarga konvensional, terutama di desa seperti Solokanjeruk (4.946 kepala keluarga laki-laki) dan Bojongemas (3.997 kepala keluarga laki-laki).

Dengan banyaknya kepala keluarga laki-laki sebagai indikasi adanya perlindungan ekonomi yang relatif stabil, karena laki-laki sebagai kepala keluarga umumnya dikaitkan dengan ketersediaan sumber penghasilan, baik melalui pekerjaan formal maupun informal.

Jumlah kepala keluarga perempuan mencapai hampir 1 dari 5 rumah tangga (18.6%) merupakan angka yang signifikan, seperti Desa Solokanjeruk (1.102 kepala keluarga perempuan) dan Desa Bojongemas (885 kepala keluarga perempuan) memiliki jumlah kepala keluarga perempuan tertinggi, ini harus menjadi perhatian dalam kebijakan sosial dan pemberdayaan perempuan

karena merupakan kelompok rentan yang lebih besar dibanding desa lain.

Berdasarkan data dan analisis di atas, maka Kecamatan Solokanjeruk menentukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, terutama bagi kepala keluarga perempuan dengan melakukan pelatihan keterampilan usaha kecil, kerajinan, atau keterampilan digital, pendataan untuk pemberian bantuan sosial tepat sasaran untuk janda, lansia, atau perempuan dengan tanggungan anak.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun
di Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025

No.	Desa	Anak Usia 0-17 Tahun
1	Rancakasumba	3.834
2	Solokanjeruk	5.333
3	Cibodas	3.844
4	Panyadap	4,163
5	Bojongemas	4.401
6	Padamukti	2.633
7	Langensari	3.613
	Jumlah	27.821

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Sem. 2 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.8, jumlah penduduk usia 0–17 tahun di Kecamatan Solokanjeruk pada tahun 2025 mencapai 27.821 jiwa. Angka ini mencerminkan besarnya potensi sumber daya manusia usia produktif di masa mendatang, yang akan menjadi generasi penerus dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah Kecamatan Solokanjeruk. Sebaran anak usia sekolah yang cukup merata di setiap desa, terutama di Desa Solokanjeruk dan Desa Bojongemas yang memiliki jumlah relatif tinggi, menunjukkan perlunya perhatian serius dalam penyediaan sarana pendidikan, kesehatan anak, serta ruang tumbuh kembang yang memadai.

Melihat potensi tersebut, pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi generasi muda ini melalui

penyediaan anggaran yang memadai, program peningkatan kapasitas SDM, serta pembangunan infrastruktur sosial dasar.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan. Kecamatan Solokanjeruk tidak dapat bekerja sendiri dalam mengelola isu dan kebutuhan anak-anak usia 0–17 tahun. Kerja sama dan sinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Dinas Sosial perlu diperkuat melalui program terpadu yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup anak. Dengan adanya dukungan kebijakan, anggaran, dan kerja sama lintas sektor yang solid, potensi besar penduduk usia muda di Kecamatan Solokanjeruk dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 2.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029
di Kecamatan Solokanjeruk

Jumlah Penduduk							Rata-rata Laju Pertumbuhan
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
84.489	85.662	85.804	86.015	85.967	93.155	94.128	1,86

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Berdasarkan data jumlah penduduk dari tahun 2019 hingga 2025, terlihat adanya fluktuasi dan tren peningkatan secara umum. Pada tahun 2019 jumlah penduduk tercatat 84.489 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 94.128 jiwa pada tahun 2025. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2023 dibandingkan 2022, yakni dari 86.015 jiwa menjadi 85.967 jiwa, pertumbuhan kembali melonjak tajam pada tahun 2024. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk selama periode ini adalah 1,86%, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan jumlah penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2024 yang menunjukkan lonjakan paling tajam dalam periode tersebut.

Tabel 2.10 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029
di Kecamatan Solokanjeruk

Desa	2026	2027	2028	2029
Rancakasumba	13.392	13.641	13.8941	14.153
Solokanjeruk	18.558	18.903	19.255	19.613
Cibodas	13.170	13.415	13.665	13.919
Panyadap	14.137	14.400	14.668	14.941
Bojongemas	14.803	15.079	15.359	15.645
Padamukti	9.474	9.650	9.830	10.013
Langnsari	12.344	12.574	12.808	13.046
Jumlah	95.879	97.662	99.479	101.329

Sumber Data : Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk 2025

Tabel proyeksi jumlah penduduk di Kecamatan Solokanjeruk pada tahun 2026 hingga 2029 dihitung dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2019-2025, sehingga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Total penduduk pada tahun 2026 tercatat sebanyak 95.879 jiwa dan terus meningkat hingga mencapai 101.329 jiwa pada tahun 2029. Setiap desa diproyeksikan mengalami pertumbuhan, dengan Solokanjeruk menjadi desa dengan jumlah penduduk tertinggi.

C. Potensi Kecamatan Solokanjeruk

Kecamatan Solokanjeruk merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung. Dengan letak geografis yang strategis serta kekayaan sumber daya alam dan budaya, Solokanjeruk memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Adapun potensi yang ada di Kecamatan Solokanjeruk adalah:

1. Geografis dan Lokasi Strategis

Kecamatan Solokanjeruk terletak di bagian timur Kabupaten Bandung, berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan lain yang juga berkembang pesat. Aksesibilitas wilayah ini cukup baik, terutama dengan adanya jalur penghubung ke pusat Kabupaten Bandung dan kawasan industri di sekitarnya. Wilayah ini memiliki topografi yang bervariasi, didominasi oleh dataran

rendah dan lahan pertanian produktif, menjadikannya cocok untuk pengembangan sektor pertanian dan pemukiman.

2. Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan

Potensi sumber daya alam di Kecamatan Solokanjeruk cukup melimpah, terutama pada sektor pertanian. Lahan pertanian mencapai sekitar 2.405 hektar sawah yang luas menjadi tumpuan utama produksi padi dan hortikultura. Selain itu didukung oleh Aliran sungai Cisunggalah dan Citarik sebagai Irigasi/sumber air lahan pertanian serta sungai-sungai kecil yang mengalir di wilayah ini juga menjadi sumber irigasi yang penting bagi keberlangsungan pertanian. Potensi lainnya di Kecamatan Solokanjeruk yaitu potensi kawasan sungai citarik Desa Cibodas dan Desa Padamukti yang mencakup berbagai aspek kehidupan social, budaya dan ekonomi masyarakat serta pemanfaatan Pengelolaan Sampah TPS3R Plus Desa Padamukti dan Pengelolaan sampah TPS3R "SIMOTAH" Desa Bojongemas.

3. Ekonomi dan UMKM

Kegiatan ekonomi masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, dan Kawasan industri pengolahan, terutama di sektor tekstil baik skala besar maupun kecil serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Di berbagai desa di Kecamatan Solokanjeruk, terdapat pelaku UMKM yang bergerak di bidang makanan olahan, kerajinan tangan, konveksi, hingga produksi barang rumah tangga. Potensi ini dapat terus dikembangkan melalui pelatihan, akses permodalan, serta digitalisasi UMKM agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

4. Pariwisata

Meskipun belum menjadi destinasi wisata utama, Solokanjeruk memiliki potensi wisata berbasis alam dan budaya yang dapat dikembangkan. Keindahan alam pedesaan, sawah yang hijau membentang, serta suasana yang masih asri cocok untuk wisata agro dan edukasi. Selain itu, kegiatan budaya lokal seperti kesenian tradisional, dan potensi kuliner khas Sunda dapat menjadi daya tarik tersendiri jika dikemas dengan baik.

5. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Solokanjeruk terus mengalami peningkatan. Jalan antar-desa sebagian besar sudah beraspal dan cukup baik untuk mendukung mobilitas warga dan

distribusi hasil pertanian maupun produk UMKM. Ketersediaan jaringan listrik dan air bersih juga sudah menjangkau hampir seluruh wilayah. Ke depan, pengembangan infrastruktur digital seperti akses internet yang merata menjadi salah satu kebutuhan penting, terutama untuk mendukung pendidikan, UMKM, dan layanan publik berbasis teknologi.

6. Sosial dan Budaya

Masyarakat Solokanjeruk dikenal sebagai masyarakat yang religius, ramah, dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Kegiatan sosial dan keagamaan cukup aktif, baik melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, maupun organisasi kemasyarakatan. Budaya Sunda masih terpelihara kuat dalam kehidupan sehari-hari, terlihat dari bahasa, kelompok-kelompok seni, hingga adat istiadat yang tetap dilestarikan. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang kuat dalam mendorong pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan segala potensi yang dimiliki, Kecamatan Solokanjeruk memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Melalui pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, Solokanjeruk dapat menjadi contoh kecamatan yang tumbuh seimbang antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya lokal

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2024

Penyajian evaluasi capaian pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dilakukan untuk menilai sejauh mana target kinerja telah tercapai sesuai rencana. Secara umum, capaian IKU menggambarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas koordinasi pemerintahan. Sementara itu, capaian IKK menunjukkan pelaksanaan kegiatan operasional yang mendukung pencapaian IKU.

Hasil evaluasi dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut:

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Pada Tahun			
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I	Nilai AKIP	67,50 Poin	68,75 Poin	68,90 Poin	69,00 Poin	74,75 poin	68,64 Poin	69,25 Poin	74,35 Poin	78,95 Poin	101,68	100,72	107,91	114,42
2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	84,00%	80,00%	81,00%	82,00%	83,00%	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masuarakat	85,50 Poin	86,00 Poin	86,50 Poin	87,00 Poin	87,50 Poin	85,86 Poin	86,33 Poin	86,82 Poin	87,43 poin	100,42	100	100,37	100,46
4	Persentase Desa Beradministrasi baik	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	100	100	-
5	Jumlah Desa cepat berkembang	-	-	-	1 Desa	1 Desa	-	-	-	1 Desa	-	-	-	100

Sumber : Solokanjeruk Agustus 2025

Dari Tabel 2.11 di atas Kecamatan Solokanjeruk mempunyai 4 indikator sasaran dan pada No.5 merupakan indikator perubahan yang merupakan perubahan dari No.4 yang dilakukan pada perubahan Renstra tahun 2024, sehingga indikator perubahan tersebut berlaku pada semester kedua tahun 2024.

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Kecamatan Solokanjeruk di atas, secara umum menunjukkan kinerja yang positif dan sesuai dengan target perencanaan strategis. Indikator seperti Nilai AKIP, Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semuanya menunjukkan capaian yang memenuhi bahkan melebihi target tahunan. Nilai AKIP terus meningkat, dengan rasio capaian yang mencapai hingga 114,42% pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Begitu juga dengan IKM yang menunjukkan konsistensi pelayanan publik yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan nilai rasio selalu di atas 100%.

Selain itu, indikator yang berkaitan dengan tata kelola desa juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Persentase Desa Beradministrasi Baik mencapai 100% pada tahun 2021 dan 2022, menunjukkan pembinaan administrasi desa berjalan optimal. Untuk indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang, target mulai ditetapkan pada tahun 2023 dan langsung tercapai sesuai harapan, yang mengindikasikan adanya kemajuan dalam upaya pemberdayaan dan percepatan pembangunan desa. Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja ini menunjukkan bahwa Kecamatan Solokanjeruk berhasil menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan sesuai dengan rencana strategis daerah.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan Kinerja yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Solokanjeruk pada Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Penyajian hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Solokanjeruk merupakan langkah penting dalam mengukur efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah. Evaluasi ini

bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja dalam kurun waktu tertentu, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui evaluasi ini, Kecamatan dapat memastikan bahwa pelayanan publik, pembinaan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi pembangunan wilayah berjalan sesuai dengan rencana strategis dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Adapun tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Solokanjeruk dapat dilihat atau dicermati dalam Rencana Strategis periode sebelumnya (periode tahun 2021 – 2026) dimana Kecamatan Solokanjeruk telah melaksanakan program dan kegiatan dengan indikator dan target yang harus dicapai sebagaimana tergambar pada Tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
I		Nilai AKIP	68,75 Point	68,90 Point	69,00 Point	74,75 point	75,00 Point	69,25 Point	74,35 Point	78,95 Point	100,72	107,91	114,42
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	68,75 Point	68,90 Point	69,00 Point	74,75 point	75,00 Point	69,25 Point	74,35 Point	78,95 Point	100,72	107,91	114,42
		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	81.00%	82.00%	83.00%	84.00%	85.00%	81.00%	81.00%	81.00%	100	100	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	100	100
	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	0 Data	0 Data	2 Data	2 Data	0 Data	0 Data	0 Data	-	-	-

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	294 Orang/bulan	294 Orang/bulan	252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	252 Orang/bulan	284 Orang/bulan	283 Orang/bulan	290 Orang/bulan	96,59	96,26	115,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	100	100	200
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	100	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0	0	0
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0	0	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	21 Orang	21 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	6 paket	7 paket	7 paket	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	40 Paket	27 Paket	34 Paket	114,28	77,14	283,3
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	16 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	15 Paket	16 Paket	16 Paket	100	100	133,3
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	6 paket	7 paket	7 paket	100	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	100	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100	100	0
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	5 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	12 Unit	0 Unit	100	240	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0
	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	100	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	9 Unit	0 Unit	0 Unit	100	0	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 unit	0 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	0 Unit	6 Unit	7 Unit	0	100	116,66
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	12 Unit	100	100	300
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0	0

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
		Nilai IKM	86,00 Point	86,50 Point	87,00 Point	87,50 Point	88,00 Point	86,00 Point	86,82 Point	87,43 Point	100	100,37	100,46
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	86,00 Point	86,50 Point	87,00 Point	87,50 Point	88,00 Point	86,00 Point	86,82 Point	87,43 Point	100	100,37	100,46
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	0	100	100
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0	100	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	-	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0	100	100
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	0	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100	100	100
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100	50	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan Kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100	0	0
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	5 Laporan	14 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	9 Laporan	16 Laporan	100	180	114,28
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0	0
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	"Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional"	0 Orang	200 Orang	200 Orang	100 Orang	100 Orang	0 Orang	150 Orang	200 Orang	0	75	100
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	300 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	300 Orang	0 Orang	0 Orang	100	0	0
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional"	50 Orang	100 Orang	100 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	140 Orang	100	50	140
	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	Laporan	0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0	0	0
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	0	100	100
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	100	100	100
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100%	100%	100%	100%	%	100%	100%	0	100	100
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan"	0 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	0	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	0	100	100
		Persentase Desa yang Beradministrasi Baik	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	100	100	-
		Jumlah Desa Cepat Berkembang			1 Desa	1 Desa	1 Desa			1 Desa	-	-	100
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	100	100	100
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	100	200	125
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100	0	0
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	0	100	200
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	"Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa"	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0	0
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	0	100	100

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	8 Laporan	100	150	133,33
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100	100	100
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	3 Lembaga Masyarakat	2 Lembaga Masyarakat	100	300	100
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	-	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	0 Jenis	0	0	0
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	200	100
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	0 Laporan	1 Laporan	0	0	100
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Keluarga yang Terfasilitasi	%	0%	0%	100%	100%	%	0%	0%	0	0	-

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun Ke-		
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2022	2023	2024
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	70 Keluarga	70 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	100 Keluarga	100 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0	0	-

Sumber : Solokanjeruk Agustus 2025

Indikator yang tertuang dalam Tabel 2.12 itu merupakan indikator utama, indikator program dan indikator kegiatan serta indikator subkegiatan sebagaimana terdapat dalam Renstra Kecamatan Solokanjeruk.

Selama periode 2022 hingga 2024, Kecamatan Solokanjeruk berhasil mencatat pencapaian kinerja pelayanan yang mengesankan, melebihi target yang telah ditetapkan pada indikator utama. Pertama, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), terdapat peningkatan signifikan, Hal ini mencerminkan efektivitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah Kecamatan Solokanjeruk, serta tingkat kepercayaan dan kepuasan yang tinggi dari masyarakat terhadap berbagai program dan layanan yang diselenggarakan.

Kedua, pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meningkat secara signifikan. Peningkatan terus menerus dalam capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk penerapan praktik-praktik manajemen yang baik, transparansi dalam pelaporan kinerja, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah. Selain itu, adopsi teknologi informasi dan sistem pelaporan yang efisien juga dapat berkontribusi pada peningkatan Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Ketiga, Indikator Persentase BMD/aset dalam kondisi baik, menunjukan pencapaian yang konsisten ini mencerminkan strategi yang efektif dalam pemeliharaan dan perawatan aset, termasuk infrastruktur jalan, bangunan publik, dan fasilitas umum lainnya di seluruh wilayah kecamatan. Upaya pemeliharaan ini membantu memastikan bahwa fasilitas yang dikelola oleh pemerintah daerah tetap berfungsi dengan baik, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk kerja keras pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Selain itu, kebijakan yang progresif dan strategis dalam mengalokasikan sumber daya dan merencanakan pembangunan juga telah berkontribusi pada pencapaian ini. Dengan demikian, dari tahun 2022 hingga 2024, Kecamatan

Solokanjeruk telah berhasil mencapai dan melampaui target yang telah ditetapkan pada indikator utama pelayanan, menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk tahun 2025 dan 2026, capaian belum dapat dihitung karena kegiatan masih berjalan dan adanya perubahan indikator. Upaya pelayanan di Kecamatan Solokanjeruk antara tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat dari capaian realiasasi dari semua indikator yang telah ditetapkan Kecamatan Solokanjeruk selalu terealisasi dan melampaui target pada setiap tahunnya, dimana pandangan masyarakat tentang kinerja pelayanan menjadi aspek penting dalam mengevaluasi perbandingan ini. Dengan realisasi hasil survei kepuasan masyarakat yang setiap tahunnya meningkat mencerminkan bahwa kinerja pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Solokanjeruk cukup baik dan efektif, serta ditunjang dengan Kebijakan pemerintah, seperti reformasi birokrasi atau program pengembangan daerah yang berdampak signifikan pada kinerja pelayanan di kecamatan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, kinerja pemerintah dinilai melalui dua hal, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Sebagaimana telah dijabarkan, akuntabilitas kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di atas. Adapun laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan Solokanjeruk tahun 2021-2026 tertuang dalam Tabel 2.13 sebagai berikut :

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.507.334.000	5.259.979.800	4.559.306.600	4.490.617.829	4.960.759.000	4.542.234.912	4.484.930.382	4.887.834.527	100,77	85,27	107,2	0,50%	3,86%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000	47.000.000	12.000.000	15.000.000	21.500.000	46.187.400	24.587.800	10.924.800	2309,37	52,31	91,04	550,13%	-51,1%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	7.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	-	4.959.800	1.999.800		70,85	99,99	-11,61%	20,16%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000	40.000.000	10.000.000	12.500.000	15.000.000	46.187.400	19.628.000	8.925.000	2309,3	49,07	89,25	462,50%	-56,0%
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	-	-	-	1.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.089.349.000	4.679.299.800	4.051.482.900	4.067.237.829	4.412.019.000	4.004.076.646	3.944.589.782	4.273.682.001	97,91	84,30	105,4	0,35%	3,43%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.083.349.000	4.671.799.800	4.045.482.900	4.061.237.829	4.406.019.000	3.998.076.646	3.937.089.782	4.267.682.601	97,91	84,27	105,4	0,35%	3,44%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	1.999.800	100	100	99,99	1,25%	2,50%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	1.999.800	100	100	99,99	1,25%	2,50%
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	1.999.800	100	100	99,99	1,25%	2,50%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.900.000	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,88%	0,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	21.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25,00%	0,00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	-	-	2.500.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	2500000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.950.000	98.364.500	80.838.700	42.410.000	106.740 000	107.726.070	91.701.000	75.661.300	165,86	93,23	93,60	-0,53%	-16,18%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	4.999.400	4.997.700	4.995.800	99,99	99,95	99,92	0,00%	-0,04%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	48.314.500	29.098.700	15.670.000	50.000.000	67.118.050	27.920.100	29.070.100	223,73	57,79	99,90	1,76%	-27,14%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	9.998.620	9.989.900	9.990.400	99,99	99,90	99,90	-12,50%	-0,04%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.210.000	15.210.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	15.200.000	4.800.000	1.995.200	99,93	31,56	99,76	-21,71%	-63,43%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.740.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000	4.739.900	4.739.800	100	100	100	0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	15.100.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	5.670.000	39.253.400	24.870.000	-	259,96	82,90	33,00%	277,8%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.000.000	16.682.500	-	10.000.000	10.000.000	44.996.000	13.936.000	-	99,99	83,54	-	-15,73%	-84,5%
Pengadaan Mebel	5.000.000	16.682.500	-	5.000.000	10.000.000	5.000.000	13.936.000	-	100	83,54		58,41%	39,36%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000	-	-	-	-	39.996.000	-	-	99,99	-	-	-25,00%	-50,0%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	259.185.000	293.710.000	345.035.000	298.470.000	320.500.000	304.354.796	330.298.800	359.505.000,00	117,43	112,46	104,1	4,32%	8,68%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	-	-	-	-		-		-	-	-	-25,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.200.000	46.200.000	53.525.000	50.000.000	36.000.000	22.199.600	46.457.600	49.758.360,00	100	100,56	92,96	29,34%	58,19%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	233.985.000	247.510.000	291.510.000	248.470.000	284.500.000	282.155.196	283.841.200	309.746.640,00	120,59	114,68	106,2	2,20%	4,86%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.950.000	109.923.000	69.950.000	55.000.000	80.000.000	34.894.000	79.817.000	168.061.426	139,86	72,61	240,26	70,71%	119,6%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.950.000	14.923.000	14.950.000	-	-	14.950.000	-	-	100	-	-	-25,00%	-50,0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	10.000.000	30.000.000	-	14.923.000	14.607.300	-	-	-	25,00%	48,94%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	10.000.000	4.950.000	4.910.000	9.900.000	99,00	98,20	99,00	12,50%	50,41%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	10.000.000	45.000.000	40.000.000	40.000.000	14.994.000	9.996.000	143.554.126	299,88	99,96	319,0	109,72%	651,3%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	80.000.000	-	-	-	-	49.988.000	-	-	62,49	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.000.000	100.000.000	250.000.000	170.000.000	205.000.000	139.238.200	139.692.500	347.149.200	309,4	139,6	138,8	60,06%	74,42%
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	5.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	-	3.969.000	15.000.000		79,38	100	66,67%	188,9%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-	5.000.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	-	3.969.000	15.000.000	-	79,38	100	58,33%	188,9%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	5.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000	-	3.969.000	15.000.000		79,38	100	58,33%	188,9%
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	5.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000		3.969.000	15.000.000	-	79,38	100	58,33%	188,9%
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	15.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000	4.999.800	14.169.000	15.000.000	-	94,46	100	8,33%	94,63%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	-	15.000.000	15.000.000	5.000.000	10.000.000	4.999.800	14.169.000	15.000.000	-	94,46	100	8,33%	94,63%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	45.000.000	75.000.000	205.000.000	150.000.000	175.000.000	134.238.400	117.585.500	302.149.200	298,3	156,7	147,3	53,29%	72,28%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	10.000.000	-	-	-	-	9.999.999	-	-	100			-25,00%	-50,00%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	35.000.000	75.000.000	205.000.000	150.000.000	175.000.000	124.238.500	117.585.500	302.149.200	354,97	156,78	147,3	65,20%	75,80%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.000.000	108.000.000	85.000.000	30.000.000	53.000.000	64.999.800	72.350.400	77.001.000	162,5	66,99	90,59	21,00%	8,87%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.000.000	108.000.000	85.000.000	30.000.000	53.000.000	64.999.800	72.350.400	77.001.000	162,5	66,99	90,59	21,00%	8,87%
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	45.000.000	40.000.000	10.000.000	30.000.000	-	30.830.800	38.956.000	-	68,51	97,39	3,47%	63,18%
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30.000.000	-	-	-	-	55.000.000	-	-	183,33	-	-	-25,00%	-50,00%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	10.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	9.999.800	19.999.700	20.000.000	100	100	100	6,25%	50,00%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	43.000.000	25.000.000	15.000.000	18.000.000	-	21.519.900	18.045.000	-	50,05	72,18	4,53%	41,93%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	40.000.000	60.000.000	35.000.000	25.000.000	9.999.800	25.687.900	-	100	64,22	61,94	77,08%	100,7%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.000.000	22.250.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	9.999.800	7.938.000	9.031.800	100	35,68	45,16	9,35%	-3,42%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.000.000	22.250.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	9.999.800	7.938.000	9.031.800	100	35,68	45,16	9,35%	-3,42%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	17.750.000	40.000.000	30.000.000	20.000.000	-	17.749.900	28.134.600	-	100	70,34	50,09%	79,25%
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	2.250.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	-	2.250.000	16.620.000	-	100	83,10	203,47%	369,3%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	15.500.000	20.000.000	25.000.000	15.000.000	-	15.499.900	11.514.600	-	100	57,57	38,51%	37,14%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100.000.000	110.000.000	112.500.000	50.000.000	50.000.000	99.999.300	92.149.600	115.275.600	100	83,77	102,4	-13,32%	8,62%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100.000.000	110.000.000	112.500.000	50.000.000	50.000.000	99.999.300	92.149.600	115.275.600	100	83,77	102,4	-13,32%	8,62%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000	50.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000	29.999.600	39.800.000	49.762.800	100	79,60	165,8	-1,67%	28,85%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	35.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	9.999.900	27.349.700	40.446.000	100	78,14	161,7	40,36%	110,6%
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	19.999.900	18.469.600	100	100	123,1	-14,58%	-3,83%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	100	-	-	-25,00%	-50,0%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	-	5.000.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	6.597.200	-	100	263,8	37,50%	65,97%
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	15.000.000	71.000.000	150.000.000	65.000.000	131.221.123	14.999.400	65.193.800	226.802.200	100	91,82	151,2	106,98%	291,2%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	15.000.000	32.500.000	65.000.000	6.500.000	36.221.123	4.999.800	30.459.800	141.826.400	33,33	93,72	218,1	31,67%	437,4%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	2.500.000	15.000.000	3.250.000	5.000.000	-	2.500.000	6.827.000	-	100	45,51	130,42%	136,5%
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.000.000	30.000.000	50.000.000	3.250.000	31.221.123	4.999.800	27.959.800	134.999.400	33,33	93,20	270	18,29%	421,0%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	38.500.000	85.000.000	10.643.000	35.000.000	9.999.600	34.734.000	84.975.800	-	90,22	99,97	33,33%	196,0%
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-	28.500.000	50.000.000	3.250.000	20.000.000	4.999.800	26.436.000	49.976.400	-	92,76	99,95	20,48%	258,8%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-	10.000.000	25.000.000	4.143.000	10.000.000	4.999.800	8.298.000	24.999.600	-	82,98	100	41,64%	133,6%
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	-	-	10.000.000	3.250.000	5.000.000	-	-	9.999.800	-		100	8,13%	50,00%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	47.857.000	60.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	-	-	-	4.143.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	4.143.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	4.143.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	6.500.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	6.500.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	-	-	-	5.856.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	4.143.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	-	4.143.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-	-	8.286.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	25,00%	0,00%
Jumlah Total	4.717.334.000	5.688.979.800	5.216.806.600	4.840.617.829	5.185.399.000	4.871.471.412	4.880.004.582	5.691.228.927	103,3	85,78	109,0	1,27%	8,40%

Sumber : Solokanjeruk Agustus 2025

Berdasarkan data Belanja Daerah Kecamatan Solokanjeruk dari tahun 2021 hingga 2025 di atas, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait tren anggaran, realisasi, dan efektivitas pelaksanaan anggaran tersebut. Pertumbuhan dan fluktuasi anggaran selama periode 2021–2025, anggaran belanja daerah menunjukkan adanya peningkatan secara umum. Pada tahun 2021 anggaran berada pada angka sekitar Rp. 5.123.626.275,- naik menjadi Rp. 5.678.725.000,- pada 2022, meskipun sempat sedikit turun pada 2023 menjadi 5.198.777.788, lalu kembali meningkat menjadi Rp. 5.999.153.667,- di 2024, dan sedikit menurun menjadi Rp. 5.878.211.720,88 di 2025. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berusaha menjaga konsistensi peningkatan anggaran belanja, meskipun ada sedikit penurunan di tahun 2023 dan 2025 yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran di Kabupaten Bandung.

Sedangkan dari sisi realisasi, terdapat peningkatan yang cukup baik dari Rp. 4.528.258.330,- di tahun 2021 menjadi Rp. 5.691.228.927,- pada tahun 2024. Rasio realisasi terhadap anggaran menunjukkan efisiensi pelaksanaan yang membaik, yakni dari 88,38% pada 2021, turun sedikit menjadi 85,78% pada 2022, namun meningkat signifikan menjadi 93,87% pada 2023, dan 94,86% pada 2024, sedangkan tahun 2025 anggaran masih berjalan. Ini menandakan bahwa meskipun anggaran meningkat, kemampuan Kecamatan dalam merealisasikan anggaran juga semakin baik, mendekati 100%.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk

Kelompok sasaran layanan di Kecamatan Solokanjeruk pada dasarnya adalah seluruh Aparatur Kecamatan (ASN dan Non ASN) serta warga masyarakat yang berdomisili dalam wilayah administrasi Kecamatan Solokanjeruk. Ini mencakup individu, keluarga, kelompok masyarakat, serta pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan berbagai bentuk layanan administrasi, rekomendasi, atau fasilitasi dari pemerintah. Warga datang untuk mengurus keperluan seperti pembuatan KTP, surat pindah, surat keterangan domisili, pengesahan dokumen, serta rekomendasi perizinan usaha kecil. Pelayanan ini penting untuk

mendukung kepastian hukum, administrasi kependudukan, dan kegiatan ekonomi masyarakat.

Selain warga perorangan, kelompok sasaran juga mencakup aparatur desa yang berada di Kecamatan Solokanjeruk. Camat bertugas membina dan mengawasi perangkat desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat desa. Kecamatan juga sering kali memberikan pelayanan pendampingan teknis, bimbingan administrasi, serta fasilitasi dalam pelaksanaan program-program pemerintah pusat maupun daerah yang melibatkan desa dan kelurahan.

Kelompok sasaran lainnya adalah lembaga kemasyarakatan seperti LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK, karang taruna, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang membutuhkan pembinaan, koordinasi, atau dukungan dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kecamatan berperan sebagai penghubung antara lembaga-lembaga ini dengan pemerintah daerah, membantu mereka dalam mengakses program-program bantuan, pelatihan, hingga kegiatan pembangunan berbasis masyarakat. Dengan demikian, layanan kecamatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi memperkuat kapasitas sosial dan pembangunan komunitas lokal.

2.1.5 Mitra Kecamatan Solokanjeruk dalam Pemberian Pelayanan

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan tidak dapat bekerja sendiri, melainkan memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kemitraan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan tugas kecamatan, khususnya dalam pemberian pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif. Adapun mitra Kecamatan Solokanjeruk dalam pemberian Pelayanan yaitu:

1. Perangkat Daerah Kabupaten (Dinas dan Badan)

   Sesuai dengan peta relasi dalam proses bisnis, kecamatan menjalin koordinasi dan kemitraan dengan seluruh dinas dan badan di tingkat kabupaten dalam upaya melaksanakan tugas

dan pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui fasilitasi dan pelaksanaan tugas pembantuan.

2. Instansi Vertikal

Instansi vertikal adalah perangkat pemerintahan pusat yang ada di daerah, yang struktur organisasinya langsung berada di bawah kementerian/lembaga, bukan di bawah pemerintah daerah. Meski begitu, dalam praktik pelayanan publik, instansi vertikal sering menjadi mitra penting kecamatan seperti:

- Kepolisian Sektor (Polsek), mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
- Komando Rayon Militer, mitra dalam bidang pertahanan dan ketahanan wilayah
- Kantor Urusan Agama, mitra dalam pelayanan urusan keagamaan, khususnya pencatatan pernikahan, pembinaan kehidupan beragama, zakat, dan wakaf.
- Kantor Pertanahan/BPN, mitra dalam urusan pertanahan, seperti sertifikasi tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan program pendaftaran tanah sistematis.

3. Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan, Kecamatan menjalin kemitraan dengan desa guna penyampaian informasi terhadap masyarakat dan selain itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Camat melaksanakan tugas atributif untuk melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi terhadap Pemerintah Desa, dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

4. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Kerja sama Kecamatan Solokanjeruk (Desa Cibodas dan Desa Padamukti) dengan pihak eksternal yaitu dengan peneliti dari CARP UI (Center for Anthropological Research and Public Engagement, Universitas Indonesia), Monash University Australia, Universitas Padjajaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BBWS Citarum dan dalam kegiatan terkait pengelolaan

sampah dan ekowisata di DAS Citarum yang mencakup Desa Padamukti dan Desa Cibodas. Adapun sampai dengan saat ini, peran kecamatan dalam proyek tersebut sebatas monitoring. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dijalankan di desa-desa tersebut tetap sejalan dengan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, serta berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur.

Kecamatan Solokanjeruk juga berperan dalam memfasilitasi komunikasi antara pihak desa dan mitra eksternal jika dibutuhkan, sekaligus menjaga agar sinergi lintas lembaga tetap terjaga. Kecamatan turut mengamati transparansi pelaksanaan kegiatan serta memberikan dukungan administratif dan legitimasi bila diperlukan. Peran monitoring ini menjadi penting agar hasil program dapat terpantau secara berkelanjutan dan memiliki potensi untuk direplikasi atau diintegrasikan ke dalam program pembangunan wilayah yang lebih luas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Solokanjeruk

Permasalahan dan isu strategis di tingkat kecamatan merupakan hal yang perlu diidentifikasi secara mendalam sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan ke depan. Kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kebijakan di wilayah, kerap menghadapi berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan dinamis, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemetaan terhadap permasalahan yang muncul serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja kecamatan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa arah pembangunan dan pelayanan dapat berjalan secara tepat, efektif, dan berkelanjutan.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional selama 5 tahun yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis serta program tahunan. RPJMN 2025–2029 disusun dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sehingga setiap arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja diarahkan untuk

mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penting dilakukan telaah agar daerah dapat menyusun perencanaan yang konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan target nasional.

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita. RPJMN Tahun 2025–2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025–2029.

RPJMN 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat arah, prioritas, dan target pembangunan Indonesia dalam jangka menengah, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi dan pemberdayaan masyarakat. Analisis terhadap RPJMN ini penting untuk memastikan bahwa permasalahan pelayanan yang diidentifikasi di tingkat kecamatan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, Renstra Kecamatan Solokanjeruk dapat dirancang secara efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan dan tantangan lokal secara tepat.

Dalam mewujudkan transformasi digital, iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, hukum berkeadilan, keamanan nasional, stabilitas ekonomi mikro serta regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif, pemerintah menetapkan salah satu prioritas nasional yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan

pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan. Reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi merupakan aspek krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi, pemakaian narkoba, judi, dan penyelundupan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Kebijakan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, serta melindungi potensi yang dimiliki oleh generasi penerus dari berbagai hambatan dan ancaman. Isu, sasaran dan arah kebijakan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Solokanjeruk dijabarkan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Isu Nasional, sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi

No	Isu Nasional	Sasaran Nasional	Arah Kebijakan
1	Keterpaduan antara layanan publik belum optimal	Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
	Akses pelayanan publik belum memadai		
	Proses bisnis dan tata kelola pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak efektif		

Sumber Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN 2025-2029

2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah pada periode tahun 2025-2029 yang terintegrasi dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD dirancang untuk menyusun kebijakan yang holistik, tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut dari evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebelumnya. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD disusun dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi yang dimiliki, serta kearifan lokal guna

memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. RPJMD berperan sebagai acuan dalam pengendalian, evaluasi, serta akuntabilitas pembangunan daerah. RPJMD juga menjadi instrumen untuk menerjemahkan sasaran strategis jangka panjang dari RPJPD ke dalam program dan kegiatan yang terukur dalam jangka menengah.

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Bandung, Kecamatan Solokanjeruk yang merupakan salah satu Perangkat Daerah di wilayah, selalu mengacu kepada visi dan misi pembangunan Kabupaten Bandung yang berangkat dari potensi dan kondisi visi pembangunan yang ada.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Bandung adalah : "Terwujudnya Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". penjabaran dari visi Kabupaten Bandung tersebut 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Lebih Bedas : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju, memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.
3. Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan, memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah

mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Berikut 5 (Lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kompetitif dan berakhlak serta penguatan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan dan mendorong perlindungan bagi anak.
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi.
5. Menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Kecamatan mempunyai kewajiban untuk mensukseskan misi nomor 3 yaitu: “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”.

Penelaahan terhadap RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 menjadi bagian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Solokanjeruk, RPJMD Kabupaten Bandung menekankan pada percepatan pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas dengan fokus pada pengelolaan tata ruang dan lingkungan berkelanjutan serta ketahanan terhadap bencana, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan serta peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah, transformasi tata kelola pemerintahan serta penguatan ketahanan sosial serta peningkatan keamanan dan ketertiban.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044 dijelaskan bahwa Penataan Ruang Kabupaten Bandung adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berkaitan dengan Wilayah Kecamatan Solokanjeruk adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Kecamatan Solokanjeruk Termasuk dalam Kawasan Bandung Timur (KBT)
2. Berdasarkan Rencana Pola Ruang Wilayah pada Pasal 34 Kecamatan Solokanjeruk diarahkan untuk menjadi kawasan peruntukan industri tingkat risiko besar
3. Sistem jaringan energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang melintasi Kecamatan Solokanjeruk yang terdiri dari SUTET Bandung Selatan – Manirancan, SUTET Bandung Selatan – New Ujung Berung
4. Sistem jaringan telekomunikasi berupa jaringan tetap
5. Kecamatan Solokanjeruk merupakan wilayah jaringan pengendalian banjir, jaringan drainase primer
6. Wilayah Kecamatan Solokanjeruk berfungsi sebagai daerah kawasan lindung, kawasan tanaman pangan, pariwisata buatan dan budaya serta peruntukan industri, kawasan permukiman perkotaan

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam setiap proses pembangunan wilayah maupun dalam

penyusunan kebijakan, rencana, dan program. KLHS berperan penting dalam mengidentifikasi serta menilai potensi dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun penurunan kesejahteraan masyarakat.

Bapperida Kabupaten Bandung telah melaksanakan kajian terhadap berbagai isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025–2029, ditetapkan sembilan isu pembangunan berkelanjutan (PB) strategis, di antaranya yang menjadi wewenang kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung

No	Isu PB Prioritas	TPB yang mendukung isu PB
1	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat	TPB 4
2	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan akibat kurangnya keselarasan program antar-OPD	TPB 14
3	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	TPB 1

Sumber : KLHS RPJMD, 2025

Sebagai salah satu wilayah administratif yang terus berkembang, Kecamatan Solokanjeruk memiliki peran strategis dalam mendukung penyelesaian isu-isu pembangunan berkelanjutan tersebut. Kecamatan Solokanjeruk berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bandung, pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara terpadu.

Dengan demikian, pembangunan di wilayah Kecamatan Solokanjeruk diharapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya alam, pemerataan kesejahteraan, serta ketahanan wilayah dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

2.2.5 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Permasalahan pelayanan di tingkat kecamatan masih menjadi tantangan yang cukup kompleks dan seringkali berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik yang diterima masyarakat serta memiliki dampak langsung terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan kondisi Kecamatan Solokanjeruk beberapa tahun terakhir, permasalahan ini meliputi aspek administratif, infrastruktur, sumber daya manusia, serta kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Adapun permasalahan utama dalam pelayanan di Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada Kecamatan Solokanjeruk

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	2	3	4
1	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan belum optimal	Kualitas sumber daya manusia Kecamatan yang belum memadai	Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya kecamatan.
		Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati	Masih belum jelasnya peraturan tentang pelimpahan kewenangan
			Pelimpahan kewenangan kepada camat tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	2	3	4
		Prosedur birokrasi yang kurang efisien	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
		Keterbatasan sarana dan prasarana dan teknologi pendukung	Belum optimalnya sarana dan prasarana dan teknologi pendukung
		Masih lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan	Belum optimalnya pemahaman tupoksi mengakibatkan tidak maksimalnya dalam melaksanakan tugas pokoknya.
		Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Kapasitas dan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi masih terbatas
		Terdapat wilayah rawan timbunan sampah liar, Limbah industri, kemacetan dan banjir	Belum optimalnya Penegakan Perda tentang pengelolaan sampah dan limbah
			Kurangnya pengelolaan sampah terpadu
			Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup masih rendah dan perencanaan tata kota belum optimal

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Dari Tabel di atas dapat dilihat akar permasalahan pelayanan di Kecamatan Solokanjeruk yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia Kecamatan yang belum memadai
2. Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati
3. Prosedur birokrasi yang kurang efisien
4. Keterbatasan sarana dan prasarana dan teknologi pendukung
5. Masih lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan
6. Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib
7. Terdapat wilayah rawan timbunan sampah liar, Limbah industri, kemacetan dan banjir

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan utama yang dihadapi kecamatan dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan adalah kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan masih belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan modern, baik dari sisi kemampuan teknis, pemahaman

terhadap regulasi, maupun etika pelayanan. Minimnya pelatihan berkelanjutan dan tidak adanya sistem pembinaan karier yang berbasis kinerja menyebabkan rendahnya profesionalisme. Hal ini berdampak langsung pada lambatnya proses pelayanan dan rendahnya kepuasan masyarakat.

Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya kompeten, minimnya alokasi anggaran pendukung, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah serta kejelasan tentang pelimpahan kewenagan yang diberikan kepada camat turut menghambat efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut. Akibatnya, kecamatan belum mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara maksimal sesuai dengan harapan desentralisasi kewenangan dari bupati.

Selain itu, prosedur birokrasi yang kurang efisien juga menjadi hambatan besar. Proses administrasi yang terlalu panjang, tumpang tindih, dan kurang memiliki kejelasan alur sering kali menyulitkan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memperpanjang waktu pelayanan, tetapi juga membuka peluang terjadinya pungutan liar atau praktik tidak etis lainnya. Penyebab utamanya adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan semakin diperburuk oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. fasilitas pelayanan yang minim dan belum berbasis digital. Ketidaksiapan dalam memanfaatkan teknologi seperti sistem layanan daring, aplikasi pengaduan masyarakat, atau database kependudukan elektronik, menyebabkan pelayanan berjalan lambat, tidak efisien, dan sering kali tidak akurat. Keterbatasan teknologi tidak hanya memperlambat pelayanan, tetapi juga menjauhkan pemerintah dari harapan masyarakat yang menginginkan akses cepat dan mudah.

Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan membuat permasalahan yang ada sulit untuk diperbaiki secara berkelanjutan. Kurang optimalnya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, serta tidak menyediakan ruang partisipasi masyarakat dalam memberi masukan atau kritik.

Tanpa pengawasan yang ketat dan transparan, kinerja aparatur tidak dapat dinilai secara objektif, sehingga kualitas pelayanan cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan signifikan.

Terakhir, timbunan sampah liar serta limbah industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan warga, kualitas air sungai serta mengakibatkan banjir. Perencanaan tata ruang dan infrastruktur yang kurang terintegrasi, serta sistem drainase yang tersedia kurang memadai menjadi permasalahan di Kecamatan Solokanjeruk

2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan Kecamatan Solokanjeruk pada masing-masing aspek sesuai dengan kondisi objektif di lapangan seperti yang telah disajikan pada uraian bab gamaran umum. Berdasarkan kondisi Kecamatan Solokanjeruk beberapa tahun terakhir, maka diperoleh beberapa isu strategis di Kecamatan Solokanjeruk adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Solokanjeruk

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Kabupaten	
Pelayanan publik tingkat dasar dan daerah Pertanian serta daerah industri	Kualitas sumber daya manusia Kecamatan yang belum memadai	Rendahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia)	Transformasi Digital	Bonus demografi	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Optimalisasi kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik
	Belum optimalnya capaian kinerja kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan bupati	Belum optimalnya tata Kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar OPD	Transformasi Digital	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan
	Prosedur birokrasi yang kurang efisien	Belum optimalnya tata Kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan mutu dan konsistensi Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel
	Keterbatasan sarana dan prasarana dan teknologi yang mendukung	Belum optimalnya tata Kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas Pelayanan publik
	Masih lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan
	Pengelolaan keuangan dan administrasi desa yang belum tertib	Belum optimalnya tata kelola pemerintah	Transformasi Digital	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Kualitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan efektivitas Pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan
	Terdapat wilayah rawan timbunan sampah liar, limbah industri, kemacetan dan banjir	Belum optimalnya penanganan tanggap darurat bencana	Perubahan iklim	Perubahan iklim, data dukung dan daya tamping lingkungan, serta ketahanan bencana	Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan penanganan permasalahan sampah, limbah dan kemacetan serta pengendalian risiko bencana di wilayah kecamatan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Isu Strategis 1: Optimalisasi kualitas sumber daya manusia aparatur untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik

Isu ini menjadi penting dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan publik. Aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas merupakan kunci utama dalam menciptakan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Solokanjeruk, seperti rendahnya kompetensi teknis dan manajerial, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta pola rekrutmen dan promosi yang belum sepenuhnya berbasis merit. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian isu strategis Kecamatan Solokanjeruk adalah bagaimana bagaimana penguatan kapasitas aparatur secara menyeluruh, baik melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, penerapan sistem merit, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja.

Isu Strategis 2: Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kecamatan

Isu ini merupakan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan agar lebih efektif dan akuntabel. Saat ini, banyak kecamatan menghadapi tantangan seperti perencanaan yang belum berbasis data, indikator kinerja yang kurang jelas, serta pelaporan dan evaluasi yang belum sistematis. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pengambilan keputusan dan tidak optimalnya capaian program. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dalam menyusun perencanaan yang terukur, menetapkan indikator kinerja yang relevan, serta melakukan pelaporan dan evaluasi secara berkala dan berbasis hasil.

Isu Strategis 3: Peningkatan mutu dan konsistensi Pelayanan publik yang cepat, mudah, dan akuntabel

Isu ini menjadi hal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di tingkat kecamatan, pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, serta minimnya pemanfaatan teknologi masih menjadi kendala utama. Hal ini tidak hanya menurunkan kepuasan masyarakat, dan menghambat efektivitas pelayanan dasar yang seharusnya cepat dan mudah diakses, seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan pengaduan masyarakat.

Untuk itu perlu melakukan beberapa upaya, antara lain dengan menyederhanakan prosedur pelayanan, meningkatkan kompetensi aparatur, serta memanfaatkan sistem pelayanan digital atau berbasis teknologi informasi.

Isu Strategis 4: Peningkatan kualitas Pelayanan publik

Tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan memuaskan. Masih ditemukannya pelayanan yang lambat, tidak konsisten, serta minimnya kepastian prosedur menunjukkan perlunya perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas aparatur. Upaya yang dilakukan antara lain: meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan, menyederhanakan prosedur layanan, memanfaatkan teknologi informasi (digitalisasi layanan), menetapkan standar pelayanan yang jelas, serta memperkuat sistem pengaduan dan evaluasi kinerja. Dengan langkah-langkah tersebut, pelayanan publik dapat menjadi lebih profesional, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Isu Strategis 5: Peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan

Isu strategis peningkatan kualitas pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan muncul karena masih lemahnya mekanisme pengendalian terhadap mutu pelayanan publik, yang menyebabkan rendahnya akuntabilitas dan tidak optimalnya pencapaian target kinerja. Pengawasan dan evaluasi yang tidak sistematis membuat masalah dalam pelayanan sering tidak teridentifikasi dengan cepat. Untuk mengatasinya, perlu diterapkan sistem monitoring dan evaluasi (*monev*) yang terstruktur, berbasis data, dan dilakukan secara berkala. Selain itu, penguatan peran pengawas internal, pemanfaatan teknologi informasi untuk pelaporan kinerja, serta pelibatan masyarakat dalam memberikan umpan balik juga menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan perbaikan berkelanjutan pelayanan publik.

Isu Strategis 6: Peningkatan efektivitas Pengelolaan keuangan desa melalui tertib administrasi dan pelaporan

Pengelolaan keuangan desa yang tertib menjadi pondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang sering muncul adalah lemahnya

pencatatan administrasi, keterlambatan laporan pertanggungjawaban, serta kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi keuangan. Hal ini mengakibatkan potensi ketidakefisienan dalam pemanfaatan anggaran dan menimbulkan kerentanan terhadap kesalahan administrasi. Oleh karena itu strategi peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan desa perlu difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa, pendampingan teknis, penerapan system administrasi dan pelaporan yang lebih tertib serta penguatan mekanisme pengawasan dan pendampingan.

Isu Strategis 7: Peningkatan penanganan permasalahan sampah, limbah dan kemacetan serta pengendalian risiko bencana di wilayah Kecamatan

Isu ini mencerminkan tantangan lingkungan dan keselamatan yang kompleks dan saling berkaitan, masih menjadi tantangan bagi Kecamatan Kecamatan Solokanjeruk, Sebagai langkah strategis yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan kolaborasi dengan dinas terkait dan masyarakat dalam pengelolaan sampah dan limbah berbasis partisipatif, penguatan regulasi dan penataan lalu lintas untuk mengurai kemacetan, serta penyusunan rencana kontingensi dan pelatihan penanggulangan bencana secara rutin. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan edukasi publik juga penting untuk mendorong kesadaran serta keterlibatan aktif warga dalam menjaga lingkungan dan menghadapi potensi risiko secara bersama-sama.

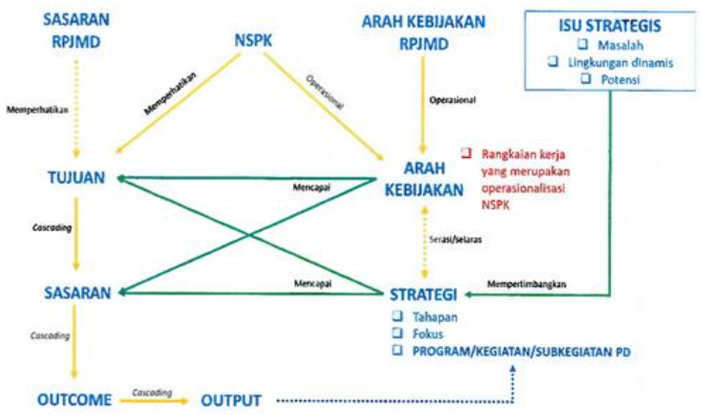
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Renstra Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas". Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan, kecamatan mendukung pembangunan misi ke-3, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

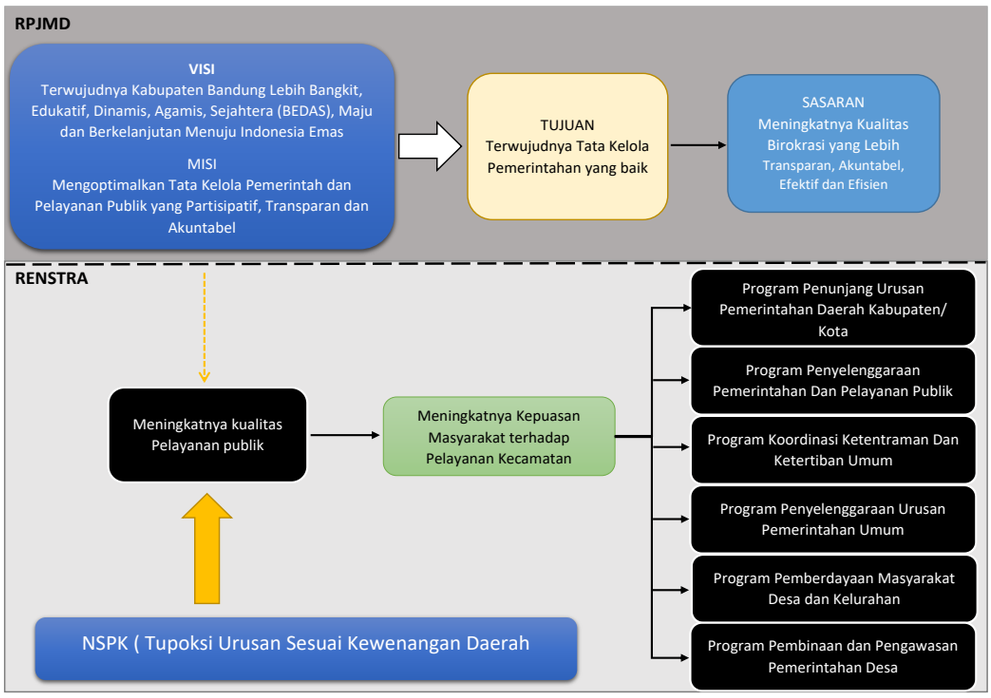
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Konsep Renstra PD dan Gambar Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD.

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung

Gambar 3.2 Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD
dengan Tujuan Renstra PD



Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung

Agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan, maka Kecamatan Solokanjeruk menetapkan tujuan jangka menengah Kecamatan berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang berpedoman kepada visi dan misi Bupati.

Tujuan dan sasaran adalah rumusan arah pembangunan dan pelayanan masyarakat yang ingin dicapai dalam periode lima tahunan. Renstra kecamatan disusun sebagai penjabaran dari RPJMD kabupaten, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di wilayah kecamatan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab permasalahan lokal dan mendorong kemajuan wilayah secara berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan 3 yaitu “Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”. Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan misi ke-3 RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang disambungkan dengan gambaran tujuan dan sasran Kecamatan Solokanjeruk, yang dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut:

Gambar 3.3 *Cascading* Tujuan, Sasaran



Sumber: Cascading Tujuan, Sasaran Kecamatan Solokanjeruk, 2025

3.1.1 Tujuan

Secara umum, tujuan Renstra Kecamatan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinatif. Hal ini meliputi peningkatan pelayanan publik, penyelarasan program lintas desa/kelurahan, dan penguatan peran kecamatan sebagai simpul komunikasi antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Renstra menjadi acuan dalam perencanaan tahunan (Rencana Kerja Kecamatan) dan dalam penyusunan usulan program ke tingkat kabupaten.

Tujuan juga merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima)

tahun. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Solokanjeruk adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Tujuan ini menggambarkan arah kebijakan utama yang hendak dicapai Kecamatan Solokanjeruk dalam meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, baik dari aspek efisiensi, efektivitas, transparansi, maupun akuntabilitas. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan ini adalah Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang menjadi indikator utama perkembangan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, laju IKM menunjukkan apakah kualitas pelayanan publik mengalami perbaikan, stagnasi, atau penurunan dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, rumusan tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” menegaskan komitmen Kecamatan Solokanjeruk untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui penerapan prinsip tersebut, Kecamatan Solokanjeruk berupaya memastikan setiap proses pemerintahan berjalan sesuai norma hukum, etika administrasi, serta menjunjung tinggi kepentingan publik.

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sasaran berfungsi sebagai arah capaian yang lebih spesifik, terukur, dan realistis, yang ingin dicapai oleh kecamatan dalam kurun waktu lima tahun. Sasaran ini menjadi tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan menjadi dasar dalam menyusun program serta kegiatan tahunan.

Sasaran Renstra disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil di wilayah kecamatan, termasuk permasalahan utama, potensi wilayah, serta isu strategis yang sedang dihadapi. Sasaran juga adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”.

Sebagai penjabaran dari tujuan tersebut, sasaran strategis yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan.” Sasaran ini lebih bersifat operasional dan konkret, dan diukur dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai IKM merupakan hasil pengukuran langsung dari persepsi masyarakat pengguna layanan kecamatan terhadap berbagai aspek pelayanan yang diterima, seperti kecepatan, ketepatan, keramahan petugas, ketersediaan sarana, hingga kemudahan prosedur. Nilai IKM ini biasanya diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala.

Perbedaan antara indikator pada tujuan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan indikator pada tingkat sasaran (Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)) memberikan gambaran yang saling melengkapi. Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melihat pergerakan atau tren perubahan kualitas layanan secara longitudinal, sedangkan nilai IKM memberikan potret kondisi aktual kepuasan masyarakat pada titik waktu tertentu. Dengan demikian, keduanya digunakan secara sinergis untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat layanan.

Penting bagi kecamatan untuk secara konsisten melakukan pengukuran IKM dan menindaklanjuti hasilnya dalam bentuk perbaikan nyata. Jika nilai IKM meningkat secara signifikan dan laju pertumbuhannya positif dari tahun ke tahun, hal tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berada pada jalur yang tepat. Oleh karena itu, integrasi antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sangat penting dalam sistem perencanaan dan evaluasi kinerja kecamatan guna menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Solokanjeruk beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Solokanjeruk

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0,08	0,52	0,59	0,60	0,61	0,63	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,50	87,96	88,47	89,00	89,55	90,11	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN RI Nomor 14 Tahun 2017

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Pada Tabel 3.1 Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Renstra 2025–2029 menyajikan informasi penting mengenai perencanaan strategis lima tahunan yang digunakan untuk memantau kinerja dan efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Tabel ini menghubungkan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target capaian dari tahun 2025 hingga 2029 untuk mendukung meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator tujuan baru pada Renstra Kecamatan Solokanjeruk. Adapun target awal 0,52 dan target akhir tahun Renstra lajunya di 0,63. Sasaran Kecamatan Solokanjeruk yang diidentifikasi sebagai “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan” bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelayanan yang diberikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kepuasan masyarakat menjadi indikator penting yang mencerminkan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, sasaran ini diukur melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan kecamatan. IKM memberikan gambaran menyeluruh mengenai persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek layanan seperti

kecepatan, kejelasan prosedur, profesionalisme petugas, serta kenyamanan sarana pelayanan.

Target tahunan yang ditetapkan mulai tahun 2026 yaitu 87,96 hingga tahun 2029 sebesar 90,11, menunjukkan adanya komitmen yang jelas dan terukur untuk terus meningkatkan kualitas layanan secara bertahap. Peningkatan nilai IKM dari tahun ke tahun menandakan adanya upaya berkelanjutan dalam memperbaiki sistem pelayanan, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan prosedur birokrasi, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Dengan target yang realistis namun progresif ini, Kecamatan Solokanjeruk diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih responsif dan profesional, sehingga kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan terus meningkat.

Secara umum, tabel di atas menunjukkan arah kebijakan yang terstruktur dan terukur untuk meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan. Dengan adanya indikator yang jelas dan target tahunan yang progresif, Kecamatan Solokanjeruk berupaya mendorong transformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. Tabel ini juga mencerminkan penerapan prinsip *good governance* yang berfokus pada akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi pelayanan di tingkat lokal.

Berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator di atas, maka dapatlah ditentukan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Solokanjeruk yaitu Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Baik IKU maupun indikator lainnya dalam penunjang kinerja kecamatan, didukung oleh program kegiatan yang mendukungnya.

3.2 Strategi Kecamatan Solokanjeruk dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analilstis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan.

Strategi Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya,

tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kecamatan Solokanjeruk.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Solokanjeruk

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana serta mekanisme pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat	Peningkatan SDM aparatur kecamatan, sarana dan prasarana pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat serta membangun pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui peningkatan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat melalui penerapan pelayanan berbasis digital	Peningkatan pelayanan publik berbasis digital berorientasi kepuasan masyarakat yang berkelanjutan
Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan melalui pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan mendorong inovasi berdasarkan hasil pemetaan permasalahan dan potensi lokal	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor	Penguatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan berbasis potensi lokal melalui peningkatan inovasi dan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Tabel di atas menunjukkan rencana lima tahapan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam konteks Kecamatan Solokanjeruk. Format ini merupakan tabel perencanaan bertahap dari tahun 2025 hingga 2029, dengan masing-masing tahun difokuskan pada peningkatan kapasitas ASN serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan sejahtera.

Secara keseluruhan, tabel ini menampilkan pendekatan bertahap dan berkelanjutan dalam penguatan kapasitas ASN dan pembangunan daerah, dengan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai tujuan utamanya.

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Solokanjeruk dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029

Strategi dan kebijakan Kecamatan Solokanjeruk dalam rangka pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, analisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai–nilai yang berkembang dalam internal serta situasi dan kondisi eksternal di lingkungan Kecamatan Solokanjeruk. Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu fokus utama dalam pembangunan Kecamatan Solokanjeruk, terutama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan dipercaya masyarakat. Pelayanan publik tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital bukan hanya untuk memperbaiki birokrasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dengan mengutamakan kepuasan masyarakat serta memperkuat pemberdayaan di tingkat desa/kelurahan, Kecamatan Solokanjeruk diharapkan mampu menjadi pusat pelayanan yang modern sekaligus motor penggerak pembangunan masyarakat.

Dengan adanya arah kebijakan Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029. Hal ini penting agar pembangunan di tingkat kecamatan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, tidak berjalan secara parsial, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung.

Tabel 3.3 Penyajian Lokus PD

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Solokanjeruk

NO	Sasaran RPJMD yang Relevan	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan berbasis potensi lokal	Peningkatan pelayanan publik yang responsif, adaptif, transparan, akuntabel dan berbasis digital berorientasi pada kepuasan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan	

Sumber : Hasil Analisis Kecamatan Solokanjeruk Agustus 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Untuk mendukung pencapaian sasaran Kecamatan, setiap program harus dirancang secara terukur melalui penetapan indikator, target, dan pagu indikatif. Ketiga elemen ini menjadi komponen utama dalam memastikan program yang dilaksanakan benar-benar sejalan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan. Indikator program digunakan sebagai alat ukur untuk menilai efektivitas pelaksanaan program. Indikator tersebut disusun secara kuantitatif maupun kualitatif, agar mampu menggambarkan capaian yang dihasilkan dari pelaksanaan program secara objektif. Dengan adanya indikator yang jelas, evaluasi terhadap keberhasilan program dapat dilakukan secara berkala dan sistematis.

Target program menggambarkan tingkat pencapaian yang ingin diraih dalam kurun waktu 2025–2029 dengan akhir tahun perencanaan pada tahun 2030. Penetapan target ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual, potensi daerah, serta sumber daya yang tersedia, sehingga tetap realistis namun tetap mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah. Sementara itu, pagu indikatif menjadi acuan awal dalam pengalokasian anggaran untuk setiap program. Pagu ini membantu memastikan bahwa sumber daya fiskal daerah dialokasikan secara proporsional dan berkeadilan, sesuai prioritas pembangunan. Dengan menyajikan indikator, target, dan pagu indikatif secara rinci, pemerintah daerah mengarahkan pembangunan secara lebih fokus, terukur, dan akuntabel.

Pelaksanaan Renstra Kecamatan Solokanjeruk tahun 2025-2029 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi rumusan program/ kegiatan/ subkegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Solokanjeruk

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat sesuai PermenPAN R) Nomor 14 Tahun 2017
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2.Hasil Penilaian Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai rata - rata atas Implementasi SAKIP yang diperoleh dari hasil evaluasi Impelmentasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bandung
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu/ Jumlah pelaksanaan Administrasi Keuangan yang direncanakanx100
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan/ Jumlah Administrasi Kepegawaian yang direncanakanx100
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
				Tersedianya data Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan/jumlah pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang direncanakanx100
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan/jumlah penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang direncanakanx100
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Terlaksananya Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan yang dialksanakan/jumlah Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan yang direncanakanx100
				Terselenggaranya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Tersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan/jumlah Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah yang direncanakan
				Tersedianya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
				Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
				Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Hasil Aplikasi BMD
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
				Terlaksananya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat/ Jumlah pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camatx100
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang dilaksanakan / koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Tersaelenggaranya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan	Persentase pelaksanaan urusan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan / jumlah kegiatan yang direncanakan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja lain di kecamatan x 100%
				Terselenggaranya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang terlaksana / jumlah koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
				Terselenggaranya urusan pelimpahan kepada camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana / Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
							Camat yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah koordinasi penegakkan perda yang berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan / Jumlah koordinasi penegakkan perda yang direncanakan berkaitan dengan Trantibum di Kecamatan x 100%
				Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana / Jumlah Koodinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah koordinasi urusan pemerintahan umum yang direncanakan x 100%
				Terselenggaranya kegiatan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah / Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah yang direncanakan x 100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
				Terlaksananya Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
				Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
				Terlaksananya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana / Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang direncanakan x 100%
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan yang direncanakan x 100%
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
					Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terselenggaranya fasilitasi dan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang dilaksanakan / Jumlah fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang direncanakan x 100%
				Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
				Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
				Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
				Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pelaksanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desa / Jumlah perencanaan pembinaan dan monev pada pemerintahan desax100
				Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi / Total jumlah desa x100%

SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
				Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Sumber : Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Dari tabel diatas dapat dijabarkan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Solokanjeruk untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
   a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
      - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
   b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
      - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
   c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Pera-ngkat Daerah
      - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
      - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
   d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
      - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
   e) Administrasi Umum Perangkat Daerah
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan

- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

c) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

d) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

a) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)

- Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
- Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

c) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga Warga dan Kelompok Masyarakat
- Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
- Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga

4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a). Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a). Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

- Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
- Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

b). Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Akselerasi pencapaian kinerja Renstra menunjukan tingginya komitmen Kecamatan Solokanjeruk dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, Komitmen ini diwujudkan melalui perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta Indikator kinerja Kecamatan Solokanjeruk periode tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
UNSUR KEWILAYAHAN				5.424.980.123		5.325.107.400		5.394.721.000		5.429.948.850		5.564.059.290	
KECAMATAN				5.424.980.123		5.325.107.400		5.394.721.000		5.429.948.850		5.564.059.290	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1. N/A 2. 42,75 poin	1. 61,00 2. 43,00 poin	4.960.759.000	1. 64,00 2. 43,25 poin	4.862.399.000	1. 67.00 2. 43,50 poin	4.862.399.000	1. 71.00 2. 43,75 poin	4.862.399.000	1.71,50 2. 44,00 poin	4.862.399.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	78,95	81,00	21.500.000	82,00	15.000.000	83,00	15.000.000	84,00	15.000.000	85,00	15.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	10.500.000	12 Laporan	10.500.000	12 Laporan	10.500.000	12 Laporan	10.500.000	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Derah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	2 Dokumen	1.000.000	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data	2 Data	2.000.000	2 Data	1.000.000	2 Data	1.000.000	2 Data	1.000.000	2 Data	1.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	4.412.019.000	100%	4.412.019.000	100%	4.412.019.000	100%	4.412.019.000	100%	4.412.019.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	290 Orang/bulan	276 Orang/bulan	4.406.019.000	276 Orang/bulan	4.406.019.000	276 Orang/bulan	4.406.019.000	276 Orang/bulan	4.406.019.000	276 Orang/bulan	4.406.019.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	4 Laporan	2.000.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	0%	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Bulan	0 Bulan	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	0%	100%	10.000.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	100%	2.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	23 Orang	10.000.000	23 Orang	2.500.000	23 Orang	2.500.000	23 Orang	2.500.000	23 Orang	2.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi	100%	100%	106.740.000	100%	77.410.000	100%	77.410.000	100%	77.410.000	100%	77.410.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	10.000.000	7 Paket	5.000.000	7 Paket	5.000.000	7 Paket	5.000.000	7 Paket	5.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 Paket	12 Paket	50.000.000	12 Paket	40.670.000	12 Paket	40.670.000	12 Paket	40.670.000	12 Paket	40.670.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	12 Paket	10.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	12 Paket	5.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.000.000	12 Paket	2.000.000	12 Paket	2.000.000	12 Paket	2.000.000	12 Paket	2.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	4.740.000	7 Paket	4.740.000	7 Paket	4.740.000	7 Paket	4.740.000	7 Paket	4.740.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	0%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	14 unit	10.000.000	14 unit	10.000.000	14 unit	10.000.000	14 unit	10.000.000	14 unit	10.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	320.500.000	100%	284.470.000	100%	284.470.000	100%	284.470.000	100%	284.470.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000	12 Laporan	36.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	284.500.000	12 Laporan	248.470.000	12 Laporan	248.470.000	12 Laporan	248.470.000	12 Laporan	248.470.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	100%	100%	80.000.000	100%	61.000.000	100%	61.000.000	100%	61.000.000	100%	61.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6 Unit	30.000.000	6 Unit	16.000.000	6 Unit	16.000.000	6 Unit	16.000.000	6 Unit	16.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	14 Unit	10.000.000	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100%	81,25%	205.000.000	81,25%	234.708.400	81,25%	329.322.000	81,25%	364.549.850	81,25%	498.660.290	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	100%	100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	10.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	100%	100%	175.000.000	100%	214.708.400	100%	309.322.000	100%	344.549.850	100%	478.660.290	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16 Laporan	23 Laporan	175,000.000	10 Laporan	214.708.400	10 Laporan	309.322.000	10 Laporan	344.549.850	10 Laporan	478.660.290	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	53.000.000	100 %	53.000.000	100 %	53.000.000	100 %	53.000.000	100 %	53.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang	284 Orang	30.000.000	284 Orang	30.000.000	284 Orang	30.000.000	284 Orang	30.000.000	284 Orang	30.000.000	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	"Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	140 Orang	70 Orang	5.000.000	70 Orang	5.000.000	70 Orang	5.000.000	70 Orang	5.000.000	70 Orang	5.000.000	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	18.000.000	12 Dokumen	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	"Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	2 Laporan	15.000.000	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	100%	5.000.000	0%	5.000.000	0%	5.000.000	0%	5.000.000	0%	5.000.000	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	100%	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0	7 Dokumen	25.000.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 dokumen	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	100%	100%	131.221.123	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	36.221.123	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	100%	16.500.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	5.000.000	1 Lembaga Masyarakat	3.250.000	1 Lembaga Masyarakat	3.250.000	1 Lembaga Masyarakat	3.250.000	1 Lembaga Masyarakat	3.250.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan	6 Laporan	31.221.123	1 Laporan	13.250.000	1 Laporan	13.250.000	1 Laporan	13.250.000	1 Laporan	13.250.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi dan Dibina	100%	100%	35.000.000	100%	10.643.000	100%	10.643.000	100%	10.643.000	100%	10.643.000	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.250.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.250.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.250.000	1 Lembaga Kemasyarakatan	3.250.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000	1 Laporan	4.143.000	1 Laporan	4.143.000	1 Laporan	4.143.000	1 Laporan	4.143.000	
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	3.250.000	1 Laporan	3.250.000	1 Laporan	3.250.000	1 Laporan	3.250.000	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0%	100%	60.000.000	100%	47.857.000	100%	47.857.000	100%	47.857.000	100%	47.857.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0 Keluarga	70 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	70 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0 Keluarga	70 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	91 Keluarga	10.000.000	100 Keluarga	6.500.000	100 Keluarga	6.500.000	100 Keluarga	6.500.000	100 Keluarga	6.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0 Keluarga	91 Keluarga	10.000.000	100 Keluarga	6.500.000	100 Keluarga	6.500.000	100 Keluarga	6.500.000	100 Keluarga	6.500.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0 Keluarga	70 Keluarga	10.000.000	70 Keluarga	5.856.000	70 Keluarga	5.856.000	70 Keluarga	5.856.000	70 Keluarga	5.856.000	
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0 Keluarga	70 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga	70 Keluarga	5.000.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	50 Keluarga	4.143.000	
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0 Keluarga	70 Keluarga	5.000.000	100 Keluarga	8.286.000	100 Keluarga	8.286.000	100 Keluarga	8.286.000	100 Keluarga	8.286.000	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Ket:

S.3.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien

4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan, maka disusunlah rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang selaras dengan tugas dan kewenangan camat secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan operasional yang mendukung pencapaian indikator kinerja kunci, serta didukung oleh alokasi pendanaan yang realistis dan proporsional berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia.

Pendanaan terhadap program kegiatan dalam rencana strategis ini bersifat indikatif sebagai proyeksi kebutuhan jangka menengah yang bisa berubah pada saat penjabaran ke dalam Renja Kecamatan, disesuaikan dengan kebutuhan pada tahun Renja, angka ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Renja kecamatan tahunan dan akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta prioritas pembangunan daerah.

Target dari indikator tujuan dan sasaran merupakan target kinerja yang harus dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada termasuk pendanaan yang harus digunakan secara efektif dan efisien guna menghasilkan hasil berupa *output* dan *outcome* yang akan memberikan kontribusi dan dampak terhadap capaian target daerah.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
4	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 melalui IKU Kecamatan Solokanjeruk

Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pelayanan publik, termasuk di lingkungan Kecamatan Solokanjeruk. IKM mengukur sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik dari segi kualitas pelayanan, kecepatan, keadilan, hingga sikap petugas pelayanan. Dalam konteks Kecamatan Solokanjeruk, IKM menjadi tolok ukur keberhasilan kecamatan dalam memberikan layanan administratif dan sosial kepada warga.

Penggunaan Laju IKM sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) mencerminkan fokus Kecamatan Solokanjeruk terhadap orientasi pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Data IKM diperoleh dari survei yang melibatkan masyarakat sebagai responden, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan persepsi dan pengalaman nyata warga. Hal ini menjadikan IKM sebagai indikator yang tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, karena mencerminkan tingkat kepuasan subjektif masyarakat terhadap layanan kecamatan.

Kenaikan atau penurunan laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat memberikan sinyal penting bagi pengambil kebijakan di Kecamatan Solokanjeruk. Jika IKM meningkat, itu berarti pelayanan yang diberikan dinilai memuaskan dan kecamatan berada di jalur yang benar dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebaliknya, penurunan IKM menandakan adanya masalah atau kekurangan dalam sistem pelayanan yang perlu segera diperbaiki. Oleh karena itu, IKM juga berperan sebagai alat evaluasi dan perencanaan strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Solokanjeruk untuk meningkatkan kualitas layanannya berdasarkan umpan balik masyarakat. Ini adalah langkah konkret dalam membangun pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan publik. Dengan menjadikan suara masyarakat sebagai dasar evaluasi, Kecamatan Solokanjeruk dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan selalu relevan, efisien, dan berdaya guna. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Solokanjeruk dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Solokanjeruk

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,08	0,52	0,59	0,60	0.61	0.63	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk 2025

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Solokanjeruk yaitu Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran penting untuk menilai sejauh mana pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan memenuhi harapan masyarakat. Indeks ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas berbagai layanan administrasi dan sosial yang disediakan oleh pihak kecamatan, seperti pelayanan surat-menyurat, izin, kependudukan, dan pengaduan masyarakat. Dalam konteks ini, IKM tidak hanya menggambarkan nilai kepuasan dalam satu waktu, tetapi juga memantau perubahannya dari waktu ke waktu, sehingga disebut "laju".

Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggambarkan tren kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan. Artinya, jika nilai IKM dari tahun ke tahun meningkat, maka hal ini menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan. Sebaliknya, penurunan nilai IKM bisa menjadi sinyal bahwa pelayanan publik di kecamatan mengalami penurunan mutu atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, indikator ini menjadi alat strategis untuk mengevaluasi kinerja aparatur kecamatan secara objektif dan berkelanjutan.

Pengukuran IKM dilakukan melalui survei kepada masyarakat pengguna layanan, menggunakan instrumen standar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Aspek-aspek yang dinilai mencakup kejelasan prosedur, waktu pelayanan, kompetensi petugas, biaya, serta sarana dan prasarana. Hasil survei tersebut diolah menjadi nilai indeks dalam skala 0–100 dan dikategorikan ke dalam tingkat kepuasan tertentu, seperti sangat baik, baik, cukup, atau kurang.

Dengan menjadikan Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator kinerja kunci, kecamatan dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pelayanannya. Hal ini juga mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Pada akhirnya, penggunaan indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kecamatan dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif dan berkualitas. Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Solokanjeruk dalam lima

tahun mendatang sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Solokanjeruk

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	0,08	0,52	0,59	0.60	0.61	0.63	Persentase dari selisih nilai IKM di kecamatan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dibandingkan dengan nilai IKM tahun sebelumnya.

Sumber: Hasil analisis Kecamatan Solokanjeruk, 2025

Adapun Target pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan oleh Kecamatan Solokanjeruk merujuk pada hasil evaluasi dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama beberapa tahun terakhir. Data historis menunjukkan tren peningkatan nilai IKM dari tahun ke tahun, untuk periode Renstra tahun 2025-2029 target dimulai dari 0,52 pada tahun 2026 dan secara bertahap meningkat menjadi 0,63 pada tahun 2030. Kenaikan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan, baik melalui perbaikan prosedur layanan, peningkatan kapasitas aparatur, maupun melalui pendekatan partisipatif terhadap kebutuhan masyarakat.

Penetapan target IKK berdasarkan data historis IKM ini bertujuan agar Kecamatan Solokanjeruk memiliki acuan kinerja yang realistis, terukur, dan progresif. Dengan menggunakan data tren masa lalu, kecamatan dapat merancang strategi peningkatan layanan yang lebih efektif serta memprioritaskan area yang masih memerlukan perbaikan. Target IKM yang meningkat tiap tahun juga menjadi indikator bahwa ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik terus berkembang, sehingga pemerintah kecamatan dituntut untuk terus berinovasi dan menjaga akuntabilitas dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publiknya.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari dokumen Renstra merupakan ringkasan inti yang mencerminkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta strategi pencapaian tujuan suatu instansi atau pemerintah daerah dalam periode lima tahunan.

Renstra menjadi dokumen fundamental yang mengarahkan semua program dan kegiatan agar berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan visi-misi yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, dokumen Renstra merupakan peta jalan strategis yang menuntun Kecamatan agar berjalan dalam jalur yang sesuai dengan visi misi Kabupaten Bandung.

Renstra menjembatani antara harapan masyarakat, kebijakan pemerintah, dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, kesimpulan substansial dari Renstra tidak hanya terletak pada isi perencanaan, tetapi juga pada komitmen untuk mewuujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui perencanaan yang terukur dan partisipatif.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029 merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Solokanjeruk dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Dengan adanya Renstra ini diharapkan dalam pelaksanaanya, tujuan organisasi dapat tercapai secara sinergis dan berkesinambungan, terutama dalam mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam Renstra Kecamatan Solokanjeruk 2025 - 2029 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025 - 2029.

2. Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 - 2029 harus dijadikan pedoman dalam penyiapan Renja Kecamatan Solokanjeruk untuk setiap tahunnya dengan tetap mengacu pada RKPD Kabupaten Bandung.
3. Dalam mendukung penyiapan APBD Kabupaten Bandung, keberadaan Rentra Kecamatan Solokanjeruk harus dijadikan pedoman penyiapan RKA dan DPA Kecamatan Solokanjeruk.
4. Apabila ada kebijaksanaan panganggaran untuk Kecamatan Solokanjeruk di luar dari Renstra ini maka akan dilakukan perubahan / perbaikan.
5. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Tahun 2025 - 2029 yang tercermin dari Renja Kecamatan Solokanjeruk, harus dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 merupakan suatu acuan dan panduan Kecamatan Solokanjeruk, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan memberikan gambaran tentang kinerja Pelayanan. Penyelesaian isu-isu strategis yang ada menghasilkan penetapan serta strategi dan kebijakan yang akan di tempuh dalam lima tahun kedepan, yang telah disesuaikan dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025-2029 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari pemangku kepentingan, baik dari internal kecamatan maupun eksternal seperti masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dan transparan guna memastikan bahwa dokumen ini mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Dengan demikian, perencanaan yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan mampu menjawab tantangan dan permasalahan yang ada secara komprehensif dan berkelanjutan.

Selain sebagai dokumen perencanaan, Renstra ini juga merupakan instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang akan digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Kecamatan Solokanjeruk dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap program dan kegiatan yang dirancang harus memiliki indikator kinerja yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi. Evaluasi kinerja secara periodik akan menjadi dasar dalam perbaikan kebijakan dan peningkatan efektivitas pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya.

Diharapkan dengan adanya Renstra ini, seluruh aparatur Kecamatan Solokanjeruk memiliki pedoman yang terarah dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Sinergi antar bidang dan kesatuan dalam pelaksanaan kegiatan akan menjadi kunci sukses dalam pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi Renstra ini akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, dan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah Kecamatan Solokanjeruk.

Akhirnya dengan telah dibuatnya Renstra Kecamatan Solokanjeruk ini diharapkan pada tahun berikutnya dapat dijadikan arah kebijakan dalam pelaksanaan tugasnya, agar di dalam pelaksanaannya kelak dapat dijadikan pedoman yang sekaligus merupakan suatu acuan dan komitmen yang lebih rinci bagi para pelaksananya.

Soreang, September 2025

CAMAT SOLOKANJERUK

Ttd

RAHMATTULAH MUKTI PRABOWO

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Kecamatan Solokanjeruk berdasarkan Pangkat dan Golongan 23

Tabel 2.2 Pegawai Kecamatan Solokanjeruk berdasarkan Tingkat Pendidikan24

Tabel 2.3 Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Solokanjeruk Berdasarkan Diklat Struktural/Kepemimpianan 24

Tabel 2.4 Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Solokanjeruk Berdasarkan Jenis Kelamin.....24

Tabel 2.5 Aset Daerah yang Dikelola Kecamatan Solokanjeruk.....25

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 35

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga di Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025 36

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun di Kecamatan Solokanjeruk Tahun 2025.....37

Tabel 2.9 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029 di Kecamatan Solokanjeruk 38

Tabel 2.10 Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2026-2029 di Kecamatan Solokanjeruk 39

Tabel 2.11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung 42

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung 45

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung.....61

Tabel 2.14 Isu Nasional, sasaran Nasional dan Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Tugas dan fungsi 79

Tabel 2. 15 Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Bandung 83

Tabel 2.16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pada 84

Tabel 2.17 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Solokanjeruk 88

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Solokanjeruk 97

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Kecamatan Solokanjeruk 99

Tabel 3.3 Penyajian Lokus PD Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Solokanjeruk.....101

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Solokanjeruk.....103

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan.....121

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....134

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Solokanjeruk.....136

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Solokanjeruk.....138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Solokanjeruk 22

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kecamatan Solokanjeruk.....34

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD 92

Gambar 3.2 Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

.....93

Gambar 3.3 *Cascading* Tujuan, Sasaran 94